

**PENINGKATAN STATUS SOSIAL EKONOMI
MASYARAKAT MELALUI PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN
TAJINAN MALANG**

SKRIPSI

Oleh:

David Ardiyanto

NIM 12130076



PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Oktober, 2016

**PENINGKATAN STATUS SOSIAL EKONOMI
MASYARAKAT MELALUI PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN
TAJINAN MALANG**

SKRIPSI

*Diajukan kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Negeri
Maaulana Malik Ibrahim Malang untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Strata Sarjana Pendidikan (S.Pd)*

Oleh:

David Ardiyanto

NIM 12130076



PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Oktober, 2016

HALAMAN PENGESAHAN

PENINGKATAN STATUS SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT MELALUI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN TAJINAN MALANG

SKRIPSI

Dipersiapkan dan disusun oleh:
David Ardiyanto (12130076)

Telah dipertahankan didepan penguji pada tanggal 16 November 2016 dan
dinyatakan
LULUS

Serta diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar strata satu
Sarjana Pendidikan (S.Pd)

Panitia Ujian

Tanda Tangan

Ketua sidang
Moh. Miftshusyaian, M.Sos
NIP. 19871082014111001

Sekretaris Sidang
Umi Julaihah, SE., M.Si
NIP. 197907282006042002

Pembimbing
Umi Julaihah, SE., M.Si
NIP. 197907282006042002

Penguji Utama
Dr. H. Wahidmurni, M.Pd, AK.
NIP. 196903032000031002



Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Malang



Dr. H. Nur Ali, M.Pd
NIP. 196504031998031002

LEMBAR PERSETUJUAN

PENINGKATAN STATUS SOSIAL EKONOMI
MASYARAKAT MELALUI PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN
TAJINAN MALANG

SKRIPSI

Oleh:

David Ardiyanto

NIM: 12130076

Telah Disetujui

Pada Tanggal, 26 September 2016

Oleh:

Dosen Pembimbing

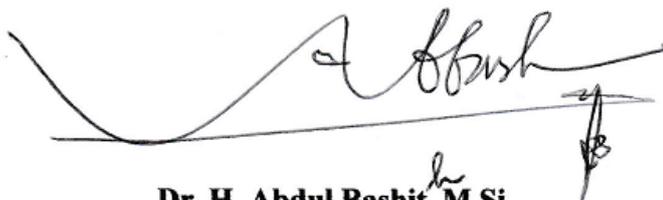


Umi Julaihah, SE, M.Si

NIP. 197907282006042002

Mengetahui

Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial



Dr. H. Abdul Bashit, M.Si

NIP. 197610022003121003

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah maha besar Allah, sembah sujud sedalam qalbu hamba haturkan atas karunia dan rizki yang melimpah, Segala puji dan syukur kupersembahkan bagi sang penggenggam langit dan bumi, dengan curahan rahmat yang menghampar melebihi luasnya angkasa raya. Sepercik keberhasilan yang Engkau hadiahkan padaku ya Rabb.

Dengan segenap kasih sayang dan diiringi do'a yang tulus ku persembahkan

Karya tulis ini kepada :

Bapak Supriyanto dan Ibu Rumana

Pengorbanan dan jerih payah yang engkau berikan untukku agar dapat menggapai cita-cita dan semangat do'a yang kau lantunkan untukku sehingga kudapat raih kesuksesan ini. Diantara perjuangan dan tetesan doa malammu

dan sebit do'a telah mengiringiku. Petuahmu memberikan jalan menuju kesuksesan dan menuju hari depan yang lebih cerah. Dengan kerendahan hati yang tulus, bersama keridhaan-Mu ya Allah saya ucapkan beribu terima kasih bagi kedua orangtuaku sang penyemangat jiwaku. Asaku kelak dapat membahagiakan beliau sampai akhir hayat.

Adekku Maratus Sholihah R.

Terima kasih atas cinta dan kasih sayangmu, semoga karya ini dapat memberi kebahagiaan tersendiri bagi kalian. Semua jasa bantuan kalian tak kan dapat kulupakan. Semoga Allah sang Maha pengasih selalu memberi berkah kepada kedua kakaku tercinta.

Semua Bapak Ibu Dosen

Atas semangatnya dan jerih payahnya membimbing dalam menyelesaikan karya ini. Beribu terima kasihku ucapkan pada bapak ibu dosen semua karena dengan ikhlas memberikan seluas-luasnya ilmunya kepadaku.

Sahabat-sahabatku

Semoga persahabatan kita menjadi persaudaraan yang abadi. Bersama kalian warna indah dalam hidupku, suka dan duka berbaur dalam kasih dan do'a dari awal hingga akhir khususnya teman seperjuangan (Uswah, Cahaya., Wildanum, Amir, Agus S., Ajru, Faiza) dan teman-teman semauanya yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

MOTTO

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (١٠٥)

Artinya: Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan" (QS. at-Taubah 9 : 105).



Umi Julaihah, SE., M.Si

Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : David Ardiyanto

Malang, 29 September 2016

Lamp. : 4 (Empat) Eksemplar

Yang Terhormat,

Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maliki Malang

di

Malang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sesudah melakukan beberapa kali bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun tehnik penulisan, dan setelah membaca skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : David Ardiyanto

NIM : 12130076

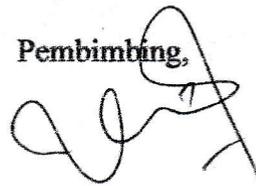
Jurusan : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

Judul Skripsi : *Peningkatan Status Sosial Ekonomi Masyarakat Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Tajinan Malang*

Maka selaku Pembimbing, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk diujikan. Demikian, mohon dimaklumi adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Umi Julaihah, SE. M.Si

NIP. 197907282006042002

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar rujukan.

Malang, 29 September 2016



David Ardiyanto
David Ardiyanto

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, tiada kata yang pantas dan patut penulis ungkapkan selain rasa syukur kehadiran Allah AWT “Sang Maha Cahaya” yang telah melimpahkan kasih-sayang-Nya yang tiada batas, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis dalam bentuk skripsi dengan mengambil judul “*Peningkatan Status Sosial Ekonomi Masyarakat Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Tajinan Malang*”.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tetap terlimpahcurahkan kepada teladan suci kita bersama Rasulullah Muhammad SAW, pemimpin dan pembimbing abadi umat. Karena, melalui Beliau kita menemukan jalan yang terang benderang dalam mendaki puncak tertinggi iman, dari gunung tertinggi Islam.

Penulis menyadari bahwa baik dalam perjalanan studi maupun dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak memperoleh bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya, permohonan maaf, dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang dengan ikhlas telah memberikan motivasi baik berupa moril, do’a restu, mau’izhah hasanah yang diberikan dengan penuh cinta dan kasih sayang, lebih-lebih materil, sehingga ananda dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan baik.
2. Adikku Tersayang Maratus Sholihah R.

3. Bapak Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Dr. H. Nur Ali, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, dan Bapak Dr. H. Abdul Bashit, M.Si selaku Kepala Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial beserta segenap dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Malang yang dengan ikhlas telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung.
5. Ibu Umi Julaihah, SE., M.Si yang dengan ikhlas membagikan waktu, tenaga, dan pikiran beliau dalam upaya memberikan bimbingan, petunjuk, serta pengarahan kepada penulis dalam proses mengerjakan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.
6. Segenap staf perpustakaan Universitas Islam Negeri Malang yang dengan ikhlas membantu menyediakan buku-buku literatur yang penulis butuhkan.
7. Kepada Camat, perangkat Kecamatan, unit pengelola kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Tajinan Kabupaten Malang.
8. Sahabatku (Uswah, Cahaya., Wildanum, Amir, Agus S., Ajru, Faiza) yang selalu ada dalam suka maupun duka dan memberikan semangat dalam penulisan skripsi.
9. Teman-teman di UIN Malang, khususnya PIPS Angkatan 2012 yang telah memberikan motivasi kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

10. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuan yang sangat bermanfaat bagi penulis demi terselesainya penyusunan skripsi ini.

Tiada ucapan yang dapat penulis haturkan kecuali “*Jazaakumullah Ahsanal Jazaa*” semoga semua amal baiknya diterima oleh Allah SWT.

Dan akhirnya, penulis mengharapkan masukan berupa saran dan kritik yang konstruktif dari pembaca demi memperbaiki karya tulis yang sederhana ini, semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi para pengkaji/ pembaca dan bagi penulis sendiri. *Amin Ya Robbal ‘Alamin.*

Malang, 29 September 2016

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulis transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Huruf

ا =	a	ز =	z	ق =	q
ب =	b	س =	s	ك =	k
ت =	t	ش =	sy	ل =	l
ث =	ts	ص =	sh	م =	m
ج =	j	ض =	dl	ن =	n
ح =	<u>h</u>	ط =	th	و =	w
خ =	kh	ظ =	zh	ه =	h
د =	d	ع =	'	ء =	,
ذ =	dz	غ =	gh	ي =	y
ر =	r	ف =	f		

B. Vokal Panjang

Vokal (a) panjang = â

Vokal (i) panjang = î

Vokal (u) panjang = û

C. Vokal Diftong

أو = aw

أي = ay

أو = û

إي = î

Daftar isi	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN NOTA DINAS	vii
HALAMAN PERNYATAAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
ABSTRAK INDONESIA	xx
ABSTRAK INGGRIS	xxi
ABTRAK ARAB	xxii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat penelitian	4
E. Orignalitas Penelitian	5
F. Definisi Istilah	6
G. Sistematika pembahasan	8
BAB II	11
KAJIAN PUSTAKA	11

A. Pembahasan Tentang Pemberdayaan	11
1. Pengertian Pemberdayaan	11
a. Tujuan Pemberdayaan	12
b. Proses Pemberdayaan	14
2. Pemberdayaan Masyarakat melalui PNPM Mandiri	16
3. Status sosial ekonomi	29
a. pengertian status sosial ekonomi	29
b. Factor factor yang mempengaruhi status sosial ekonomi	30
BAB III	35
METODE PENELITIAN	35
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	35
B. Kehadiran Peneliti	36
C. Lokasi Penelitian	37
D. Data dan Sumber Data	37
E. Teknik Pengumpulan Data	39
F. Analisis Data	42
G. Pengecekan Keabsahan Data	44
H. Prosedur Penelitian	45
BAB IV	50
PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	50
A. Paparan Data	50
1. Kondisi Masyarakat	50
2. Bentuk dan Jenis Kegiatan	53
3. Implementasi kegiatan PNPM	61
4. Dampak Program Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri	76
B. Hasil penelitian	80
1. Kondisi Masyarakat	80
2. Bentuk dan Jenis Kegiatan	83
3. Implementasi kegiatan PNPM	91
4. Dampak Program Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri	102
BAB V	107
PEMBAHASAN	107
A. Analisis dan Interpretasi Data	107

1. Bentuk kegiatan	107
2. Proses Implementasi	109
3. Hasil Implementasi	120
BAB VI.....	124
PENUTUP.....	124
A. Kesimpulan.....	124
Daftar Pustaka	126



ABSTRAK

Ardiyanto. David 2016. “Peningkatan Status Sosial Ekonomi Masyarakat Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang”. Skripsi, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Umi Julaihah, SE., M.Si

Kata Kunci : Pemberdayaan Masyarakat, Status Sosial Ekomi,

Sebagai konsekuensi logis dari pembangunan nasional ini adalah munculnya kebutuhan pemerataan kesejahteraan hidup bagi semua lapisan masyarakat yang secara langsung akan meningkatkan status sosial ekonomi masyarakat. Pemerintah Indonesia bertekad untuk mencapai tujuan pembangunan melalui program penanggulangan kemiskinan seperti PNPM mandiri pedesaan. Kecamatan Tajinan adalah salah satu Kecamatan yang berpartisipasi dalam Program Nasional Pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan sejak tahun 2008 hingga saat ini Kecamatan Tajinan terdiri dari dua belas desa dengan jumlah penduduk sebanyak 50.685 jiwa atau 12.672 kepala keluarga dan dari jumlah tersebut sebanyak 2.576 kepala keluarga atau 20,32% dikategorikan sebagai rumah tangga miskin.

Fokus penelitian ini: (1) Bagaimana bentuk kegiatan program Pemberdayaan Masyarakat PNPM di Kecamatan Tajinan. (2) Bagaimana implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat PNPM dalam meningkatkan status sosial ekonomi masyarakat di Kecamatan Tajinan. (3) Bagaimana hasil implementasi program pemberdayaan PNPM dalam meningkatkan status sosial ekonomi masyarakat di Kecamatan Tajinan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus, yaitu peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan secara intensif, terperinci, dan mendalam pada kasus yang terjadi. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan dan menginterpretasikan data-data yang ada untuk menggambarkan realitas sesuai dengan fenomena yang sebenarnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) bentuk kegiatan Program pemberdayaan PNPM mandiri pedesaan dalam meningkatkan status sosial ekonomi masyarakat meliputi bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan pembangunan sarana masyarakat. (2) Dalam proses implementasi program pemberdayaan masyarakat mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan sampai pelaksanaan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. (3) Hasil implementasi program nasional pemberdayaan meliputi bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan sarana umum bagi masyarakat dari kegiatan tersebut dapat menstimulus keberdayaan masyarakat untuk lebih berdaya dan sejahtera serta meningkatkan status sosial ekonomi masyarakat.

ABSTRACT

Ardiyanto. David, 2016. "The Improvement Of Socio-Economic Status Of The Community Through The National Community Empowerment Program Sub Tajinan Malang". Thesis, Department of Social Sciences Education, Faculty of MT and Teacher Training, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Umi Julaihah, SE., M.Si

Keywords: Community Empowerment, Social Economic Status

As a logical consequence of national development is the emergence of the need for equitable distribution of the welfare of all sections of society, which will directly improve the socio-economic status of the community. The Indonesian government aims to achieve development through poverty alleviation programs, such as the National Program for Community Empowerment rural independent. Tajinan sub-district is one of the District who participated in the National Program for Community Empowerment rural independent since 2008 until now. Tajinan sub-district consists of twelve villages with a population of 50 685 people or 12 672 households. And of that number, 2,576 heads of household, or 20.32% is categorized as poor households.

The focus of this study:

(1) How do the activities of Community Empowerment PNPM program in Subdistrict Tajinan. (2) How is the implementation of the Community Empowerment Program PNPM in improving the socioeconomic status of people in the District Tajinan. (3) How do the results of the implementation of the Program for Community Empowerment PNPM increase the socioeconomic status of people in the District Tajinan.

The approach in this study is a qualitative approach with case study, the researchers went to the field to conduct an intensive, detailed and in-depth on the case. Methods of data collection is done through observation, interviews, and documentation. To analyze the data, researchers used a qualitative descriptive analysis techniques, which describe and interpret the data obtained. To illustrate the reality in accordance with the actual phenomenon.

The results showed that,

(1) The form of the activities of the National Program for Community Empowerment (PNPM) rural independent in improving socioeconomic status of people covering the fields of economy, education, health and construction of public facilities. (2) In the implementation process of community empowerment program from planning to implementation involves all levels of society.(3) The results of implementation of the national community empowerment program covering the fields of economy, education, health and construction of public facilities. For society, of these activities can stimulate community empowerment for the more powerful and prosperous, as well as improving the socio-economic status of the community.

مستخلص البحث

أردبيانطو ، دافد 2016 .إرتفاع الدرجة الإجتماعية والإقتصادية من خلال البرنامج تمكين المجتمع الوطني في ناحية تاجنان ملانج . البحث العلمي ، قسم تعليم العلوم الاجتماعية كلية علوم التربية والتعليم ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية ملانج . أمي جوليحة الماجستير

الكلمة الأساسية : تمكين المجتمع ، درجة الإجتماعية والإقتصادية

ومن التابعة المعقولة عن البناء الوطني هي بظهور الحاجة المتساوية والسلامة في حياة المجتمع وترفع الدرجة الإجتماعية والإقتصادية مباشرة . تقصد الحكومة الإندونيسية للوصول إلى الأهداف البناء بالبرنامج الإبقاء الفقير مثل البرنامج تمكين المجتمع الوطني مستقل للقرية . ناحية تاجنان إحدى من ناحية التي تشترك في البرنامج تمكين المجتمع الوطني مستقل للقرية من السنة 2008 حتى الآن. ناحية تاجنان تتكون من إثني عشر قرى وأما عدد السكان 50.682 شخصا أو 12.672 رئيس العائلة ومن ذلك العدد 2.576 من رئيس العائلة أو 20.32 % تدخل إلى العائلة الفقيرة .

تركيز البحث : (1) كيف أنشطة البرنامج تمكين المجتمع في البرنامج تمكين المجتمع الوطني في ناحية تاجنان ملانج . (2) كيف تطبيق البرنامج تمكين المجتمع في البرنامج تمكين المجتمع الوطني في ناحية تاجنان ملانج . (3) كيف نتائج التطبيق برنامج تمكين المجتمع في البرنامج تمكين المجتمع الوطني في إرتفاع الدرجة الإجتماعية والإقتصادية في ناحية تاجنان .

لوصول إلى الأهداف المذكورة وأما المدخل المستخدمة في هذا البحث هي المدخل الكيفي بالمنهج دراسة الحالة . والمراد هي تلاحظ الباحث إلى ميدان البحث بالدقيق والعميق عن المشكلة الموجودة . وطريقة جمع البيانات هي الملاحظة والمقابلة والوثائق . وأما تحليل البيانات بطريقة الكيفية وصفية وهي توصف وتفسير البيانات الموجودة لتصور الواقعة المناسبة باظواهر الحقيقية .

وأما نتائج البحث هي : (1) أن أنشطة البرنامج تمكين المجتمع في البرنامج تمكين المجتمع الوطني في القرية لإرتفاع درجة الإجتماعية والإقتصادية تشمل على المجالات وهم الإقتصادية والتربية والصحة وبناء الوسائل المجتمع. (2) في عملية التطبيق البرنامج تمكين المجتمع من التخطيط إلى الإجراء تشمل على جميع المجتمع . (3) نتائج التطبيق البرنامج تمكين المجتمع الوطني تشمل على المجالات وهم الإقتصادية والتربية والصحة وبناء الوسائل المجتمع ومن الأنشطة تستطيع أن تدافع قوة المجتمع لكي تكون قادرا وأمنا وكذلك ترفع الدرجة الإجتماعية والإقتصادية .

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak terpisahkan dari kerangka besar pembangunan nasional. Karena salah satu tujuan bangsa Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa., sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4. Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa berarti mensejahterakan dan mencerdaskan seluruh aspek kehidupan seluruh tumpah darah bangsa Indonesia agar mampu hidup layak dan terhormat di tengah-tengah kehidupan bangsa-bangsa lain di dunia.

Sebagai konsekuensi logis dari pembangunan dunia nasional ini adalah munculnya kebutuhan pemerataan kesejahteraan hidup bagi semua lapisan masyarakat yang secara langsung akan meningkatkan status sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Keberadaan lulusan pendidikan merupakan sumber daya manusia yang akan menjadi subjek dan objek pembangunan. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan bukan saja dapat diketahui dari mutu individu warga negara, melainkan juga erat kaitannya dengan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

Pemerintah Indonesia bertekad untuk mencapai tujuan pembangunan millennium atau lebih dikenal dengan Millenium Development goals (MDGs) melalui penguatan atau perancangan kembali program program penanggulangan kemiskinan yang telah ada seperti PNPM mandiri pedesaan. Program Nasional pemberdayaan nasional masyarakat di Indonesia dalam rangka untuk melengapi dan menguatkan gerakan pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh. Secara umum program ini bertujuan mendorong partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin. dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelestarian pembangunan serta mendorong kemandirian masyarakat

Tujuan umum program pemberdayaan PNPM mandiri pedesaan adalah Mendorong partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan serta mendorong kemandirian masyarakat ¹

Kecamatan Tajian adalah salah satu Kecamatan yang berpartisipasi dalam Program Nasional Pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan sejak tahun 2008 hingga saat ini Kecamatan Tajinan terdiri dari dua belas desa dengan jumlah penduduk sebanyak 50.685 jiwa atau 12.672 kepala keluarga dan dari jumlah tersebut sebanyak 2.576 kepala keluarga atau 20,32% dikategorikan sebagai rumah tangga miskin. Kecamatan Tajinan telah

¹ Petunjuk teknis oprasional PNPM mandiri pedesaan

mendapatkan dana bantuan langsung untuk masyarakat (BLM) dana tersebut di kelola secara mandiri oleh masyarakat melalui unit pengelola kegiatan (UPK) Kecamatan Tajinan. Sejak tahun 2008 hingga saat ini Secara umum dana bantuan langsung untuk masyarakat di manfaatkan masyarakat untuk mendukung kegiatan di bidang peningkatan kapasitas sarana dan prasarana, bidang social, ekonomi perdesaan, kegiatan pendidikan dan kesehatan. Melalui program pemberdayaan masyarakat dapat menstimulus keberdayaan masyarakat sehingga dapat mengatasi kemiskinan dan dapat meningkatkan status sosial ekomi masyarakat di Kecamatan Tajinan .Berdasarkan hal ini peneliti mengambil judul penelitian “ Peningkatan Status Sosial Ekonomi Masyarakat Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan dalam latar belakang di atas penulis memandang adanya permasalahan yang layak untuk diadakan penelitian lebih lanjut, adapun masalah terinci:

1. Bagaimana bentuk kegiatan program Pemberdayaan Masyarakat PNPM di Kecamatan Tajinan
2. Bagaimana implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat PNPM dalam meningkatkan status sosial ekonomi masyarakat di Kecamatan Tajinan

3. Bagaimana hasil implementasi program pemberdayaan PNPM dalam meningkatkan status sosial ekonomi masyarakat di Kecamatan Tajinan

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas maka penulis menentukan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mendiskripsikan bentuk program kegiatan Pemberdayaan Masyarakat PNPM di Kecamatan Tajinan?
2. Untuk mendiskripsikan bentuk implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat PNPM dalam meningkatkan status sosial ekonomi masyarakat di Kecamatan Tajinan?
3. Untuk mendiskripsikan hasil mplementasi program pemberdayaan PNPM dalam meningkatkan status sosial ekonomi masyarakat di Kecamatan Tajinan?

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah khasanah ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang Pendidikan Luar Sekolah khususnya dalam program pemberdayaan masyarakat.
- b. Bagi penulis sendiri dapat menambah pengetahuan tentang pentingnya pemberdayaan masyarakat melalui program PNPM Mandiri.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi masyarakat

Dapat digunakan oleh masyarakat sebagai sumbangan pengetahuan dan referensi bagi penelitian yang akan datang.

b. Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan terutama dalam bidang pemberdayaan masyarakat, terutama pada program Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri

E. Originalitas Penelitian

No	Nama peneliti, judul, bentuk (skripsi / tesis / jurnal / dll)	Persamaan	perbedaan	Orisinilitas penelitian
1	Agung Tri Purnomo / Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Melalui Program PNPM Mandiri Perkotaan / skripsi / 2013	Tentang pemberdayaan masyarakat melalui program PNPM	Partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan	Implementasi pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan pendidikan
2	Tri Septin Muji Rahayu / Pengaruh Program Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Terhadap Tingkat Pendapatan Masyarakat Di Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas / jurnal / 2014	Tentang pemberdayaan masyarakat	Pengaruh program terhadap tingkat pendapatan masyarakat	Implementasi pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan pendidikan
3	Asrawi Madjid / Pengaruh Program Nasional Pemberdayaan	Tentang Pemberdayaan masyarakat	Pengaruh program terhadap	Implementasi pemberdayaan masyarakat dalam

	Masyarakat (Pnpm) Mandiri Perkotaan Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kota Kotamobagu /jurnal/ 2015		tingkat kemiskinan masyarakat	meningkatkan pendidikan
4	Firman uding / Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Ponggi Kecamatan Porehu Kabupaten Kolaka Utara / skripsi / 2015	Tentang Pemberdayaan masyarakat	Implementasi program dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Implementasi pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan pendidikan
5	Mohammad Amiruddin / Analisis Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (Pnpm) Mandiri Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Balongmojo Mojokerto / skripsi / 2014	Tentang Pemberdayaan masyarakat	Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (Pnpm) Mandiri Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Implementasi pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan pendidikan

F. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam pengertian yang dimaksud dalam judul penelitian di atas, maka peneliti memberikan batasan dan penjelasan pada beberapa istilah pokok maupun kata yang menjadi variabel penelitian berikut:

1. Status sosial ekonomi

Peningkatan Status sosial ekonomi disini dapat diartikan meningkatnya kesejahteraan kehidupan masyarakat yang mana adalah

kondisi terpenuhinyakebutuhan material, spiritual dan sosial warga agardapathiduplayakdan mampumengembangkan diri,sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kesejahteraanekonomi adalah terpenuhinya kebutuhan ekonomi bagi parapelaku ekonomi atau masyarakat, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah terpenuhinya kebutuhan ekonomi masyarakat sasaran program diKecamatan Tajinan Kabupaten malang. Kesejahteraan masyarakat yang menurut Biro Pusat Statistik Indonesia dapat diukur dengan beberapa indicator sebagai berikut:

- a. Tingkat pendapatan keluarga
- b. Komposisi pengeluaran rumah tangga
- c. Tingkat pendidikan keluarga
- d. Tingkat kesehatan keluarga
- e. Kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga

2. Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah upaya untuk mengembangkan potensi yang sudah dimiliki oleh masyarakat di daerah tersebut dengan harapan memberikan peranan kepada individu sebagai pelaku sehingga mandiri untuk berkembang

3. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

PNPM Mandiri merupakan salah satu program pemerintah untuk mendorong penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. PNPM Mandiri difokuskan pada program penanggulangan kemiskinan yang berbasis partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri merupakan integrasi dan perluasan program-program penanggulangan kemiskinan yang berbasis masyarakat yang sudah berjalan. PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan dan juga program pengentasan kemiskinan yang dicanangkan oleh pemerintah agar angka kemiskinan dan pengangguran di tingkat perdesaan menurun

G. Sistematika pembahasan

Untuk mempermudah pembaca dan penulis dalam memahami penelitian ini perlu adanya sistematika pembahasan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis mencantumkan sistematika pembahasan yang sesuai dengan permasalahan yang ada.

BAB I: Pendahuluan

Dalam pendahuluan ini berisikan tentang latar belakang masalah, focus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: Kajian Pustaka

Didalamnya terdapat pembahasan tentang implementasi program pemberdayaan PNPM dalam meningkatkan status sosial ekonomi masyarakat yang mencakup pengertian pemberdayaan, pengertian program PNPM , tujuan program Pemberdayaan, prinsip program Pemberdayaan, tahapan dan mekanisme program, Pengertian status sosial ekonomi, peningkatan status sosial ekonomi, faktor pendorong factor penghambat

BAB III: Metode Penelitian

Didalamnya terdapat pembahasan tentang rencana penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, prosedur penelitian, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV: Hasil Penelitian

Di dalamnya dipaparkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan di lapangan terdiri dari realita objek berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, yang terdiri dari latar belakang objek dan penyajian data.

BAB V: Pembahasan Hasil penelitian

Didalamnya merupakan hasil penelitian, yang terdiri dari pemaparan tentang gambar umum program pemberdayaan PNPM Kecamatan Tajinan Malang, tahapan serta mekanisme program pemberdayaan PNPM mandiri pedesaan Kecamatan Tajinan Malang, struktur organisasi, keadaan masyarakat di Kecamatan Tajinan malang

BAB VI: Penutup

Di dalamnya merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dari semua isi dan hasil penelitian tersebut, baik secara teoritis maupun empiris. Setelah itu penelitian mengajukan saran-saran untuk perbaikan dan kemajuan program PNPM Kecamatan Tajinan Malang.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pembahasan Tentang Pemberdayaan

1. Pengertian Pemberdayaan

Secara konseptual pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowerment) berasal dari kata “power” (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Ilmu sosial tradisional menekankan bahwa kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan kontrol. Pengertian ini mengasumsikan bahwa kekuasaan sebagai sesuatu yang tidak berubah atau tidak berubah. Kekuasaan sesungguhnya tidak terbatas pada pengertian diatas. kekuasaan vacuum dan terisolasi. Kekuasaan senantiasa hadir dalam konteks relasi sosial antar manusia.²

Pemberdayaan menunjukkan pada kemampuan kelompok orang, khususnya kelompok lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam : a.memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; b. menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan Pemberdayaanmenunjukkan pada kemampuan

²Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: Refika aditama, 2010)
Hlm. 58.

kelompok orang, khususnya kelompok lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam: a. memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; b. menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan.³

a. Tujuan Pemberdayaan

Beberapa ahli di bawah ini mengemukakan definisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan.⁴

- 1) Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung.
- 2) Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagai pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh ketrampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.
- 3) Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial.

³Ibid, hlm. 58.

⁴Edi. Suharto. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa bahwa pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu upaya untuk membentuk manusia lebih berhasil guna peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan adanya pemberian energi atau proses tindakan agar yang bersangkutan mampu bertindak mandiri dan didukung adanya peningkatan usaha yang mengarah ke peningkatan penghasilan.

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Pemberdayaan dilakukan dengan tujuan sama halnya dengan pembangunan, yaitu meningkatkan kesejahteraan sosial di masyarakat, menghilangkan adanya kesenjangan sosial sehingga tercipta adanya suatu perkembangan yang maju dan mandiri dalam kehidupan bermasyarakat.⁵

Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (misalkan persepsi mereka sendiri), maupun kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil). Berdasarkan pendapat para pakar tersebut di atas, tujuan pemberdayaan dapat dipahami sebagai

⁵ Ambar Teguh, Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2004), hlm. 115.

terwujudnya perkembangan usaha yang dijalankan untuk bisa hidup mandiri serta tercukupi kebutuhan hidupnya dengan jalan memberikan berbagai dorongan usaha yang berbentuk modal usaha beserta kegiatan bagi anggota masyarakat⁶

b. Proses Pemberdayaan

Proses pemberdayaan pada umumnya dilandasi pada upaya mengoptimalkan proses kegiatan. proses adalah seluruh kegiatan/langkah-langkah secara bertahap yang dilakukandalam rangka pemberdayaan agen pembaharu, yang terdiri dari:⁷

- 1) pendekatan *capacity building* untuk memberdayakan kelembagaan agen pembaharu,
- 2) pendekatan *new public management* (NPM) untuk meningkatkan kemampuan manajerial agen pembaharu secara internal,
- 3) pendekatan kinerja untuk peningkatan kinerja organisasi agen pembaharu,
- 4) pendekatan substansial melalui pengorganisasian *knowledge, attitude, practice* (KAP) agar agen pembaharu menguasai aspek dan substansi kemiskinan, mampu menentukan solusi dan pendekatan yang tepat untuk menciptakan kemandirian masyarakat.

Pelaksanaan proses dan strategi pemberdayaan dapat dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang dapat disingkat

⁶ Edi. Suharto, *op.cit.*, hlm. 60.

⁷ Ambar Teguh, Sulistiyani. *Op.cit.*, hlm. 118.

menjadi 5P, yaitu: Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan, dan Pemeliharaan:⁸

- 1) Pemungkinan: menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.
- 2) Penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan- kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh-kembangkan segenap kemampuan dan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.
- 3) Perlindungan: melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan tidak sehat antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
- 4) Penyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong

⁸Suharto, Edi. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. (Bandung: 2009) hlm, 32.

masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.

- 5) **Pemeliharaan:** memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

2. Pemberdayaan Masyarakat melalui PNPM Mandiri

Hakekat pemberdayaan pada dasarnya adalah penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat bisa berkembang. Logika ini didasarkan pada asumsi bahwa setiap masyarakat pasti memiliki daya akan tetapi kadang-kadang mereka tidak menyadari atau potensi yang ada belum tergali untuk dikembangkan. Pemberdayaan jangan menjebak masyarakat dalam perangkap ketergantungan, sehingga pemberdayaan sebaiknya mengantarkan pada proses kemandirian, dalam tinjauan ekonomi, terdapat tiga daya dalam model pemberdayaan, yaitu:⁹

- a. Daya manusia mencakup deskripsi dan potret secara kualitatif dan kuantitatif meliputi aspek pendidikan, wawasan ilmu pengetahuan, keterampilan dan kemampuan di sisi manajemen.
- b. Daya lingkungan yaitu potensi yang dikembangkan berdasarkan kondisi geografis maupun alam yang ada di daerah.

⁹Term of refrence (TOR) Upk Pokja PNPM 2015, hlm. 6

- c. Daya ekonomi merupakan kemampuan untuk menghasilkan nilai tambah untuk mendapatkan nilai ekonomi yang lebih tinggi dalam rangka meraih keberdayaan masyarakat.

Proses pemberdayaan masyarakat mendasarkan pada empat prinsip, yaitu:¹⁰

- a. Partisipatif, adalah proses pemberdayaan harus dilakukan secara demokratis dengan melibatkan semua stakeholders baik pemerintah, swasta, masyarakat, termasuk masyarakat miskin itu sendiri. Sehingga masyarakat tidak lagi hanya menjadi objek namun subjek dalam perencanaan pemberdayaan.
- b. Transparansi, adalah adanya keterbukaan di antara stakeholders sehingga setiap tahapan akan direncanakan, mulai dilaksanakan sampai dengan evaluasi dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
- b. 3. Akuntabilitas, adalah perencanaan pemberdayaan nantinya dapat diimplementasikan dan tercapai tujuan serta sasarnya.
- c. Manfaat bersama, adalah proses pemberdayaan ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada upaya pembangunan masyarakat sebagai kontribusi untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional.

Tiga pelaku penting yang terkait dalam pemberdayaan yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Suatu program akan berjalan efektif

¹⁰ Ibid .hlm, 11.

jika semua pihak duduk bersama tanpa ada kecurigaan, yang selama ini terjadi, kurang adanya koordinasi di antara lembaga-lembaga tersebut. Setiap departemen pemerintah, mempunyai program pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Namun tidak ada koordinasi yang jelas. Akibatnya mereka seakan berjalan sendiri-sendiri. Kalau ada yang mengkoordinir, maka hasilnya akan lebih efektif, untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran, yang perlu dilakukan adalah memberdayakan masyarakat. Ini akan lebih efektif dibandingkan hanya memberikan bantuan yang sifatnya sesaat, yang dibutuhkan adalah pemberian akses kepada masyarakat tersebut. Hal inilah yang kurang dilakukan pemerintah, pemerintah perlu diberi akses kepada masyarakat dibanding ekonomi, sosial, budayadan sebagainya.

Masyarakat harus dibantu untuk bisa mencari makan sendiri. Jadi jangan hanyadiberi makan. Intinya adalah buatlah program-program pemberdayaan yang berkesinambungan. Pembangunan di bidang ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah pada dewasa ini disektor pertanian, perikanan, perkebunan, industri dan pertambangan, hakekatnya ditujukan selain untuk mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi, juga dimaksudkan untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Seharusnya tidak semua masalah kemiskinan menjadi tanggung jawab pemerintah. Rasanya tidak fair kalau seluruhnya dibebankan hanya kepada pemerintah. Terutama golongan masyarakat yang mampu juga secara sukarela diharapkan dapat berkontribusi mengatasi masalah

kemiskinan yang terjadi di negeri ini. Program mengatasi kemiskinan yang paling murah adalah si kaya membantu si miskin atau si pandai membantu yang bodoh. Idealisme dan pengorbanan yang diperlukan untuk mengatasi kemiskinan di negeri ini bukan sesuatu yang berada di menara gading dan bukan pulayangdiada-adakan. Idealisme dan pengorbanan tersebut sesungguhnya adalah sebuah realita yang sudah terjadi di masyarakat.¹¹

Pemberdayaan mempunyai beberapa tahap, antara lain:¹²

- a. Tahap kesadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
- b. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar mampu mengambil peran dalam pembangunan.
- c. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuk inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantar pada tahap kemandirian.

Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri, masyarakat diberdayakan dalam artian potensi yang ada di masyarakat digali untuk dikembangkan. PNPM-M merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendorong penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. PNPM-M difokuskan pada program penanggulangan

¹¹LaodeZainudin, <http://organisasi.org/pengertian-pengangguran-dan-jenis-macam-pengangguran-friksional-struktural-musiman-siklikal>, diakses tgl 2-09-2016 08:55 am.

¹² Petunjuk teknis operasional PTO PNPM

kemiskinan yang berbasis partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. PNPM-M merupakan integrasi dan perluasan program program penanggulangan berbasis masyarakat yang sudah berjalan. PNPM-M yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia ada tiga jenis, yaitu:

- a. PNPM M Perdesaan
- b. PNPM-M Perkotaan
- c. PNPM-M Wilayah Khusus dan Desa Tertinggal

Tujuan PNPM-M secara umum adalah meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan. Tujuan PNPM-M secara khusus yaitu:¹³

- a. meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelestarian pembangunan
- b. melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber daya lokal
- c. mengembangkan kapasitas pemerintahan lokal dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif
- d. menyediakan sarana prasarana dasar sosial dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat
- e. melembagakan pengelolaan dana bergulir

¹³ Term of refrence (TOR) Upk Pokja PNPM 2015

- f. mendorong terbentuk dan berkembangnya Badan Kerja Sama Antar Desa dalam pengelolaan pembangunan
- g. mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan

Visi PNPM-M adalah mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin di perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan.

Misi PNPM-M yaitu:¹⁴

- a. meningkatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya
- b. pelembagaan sistem pembangunan partisipatif
- c. mengoptimalkan fungsi dan peran pemerintah lokal
- d. peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana dasar masyarakat
- e. pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan

Keluaran (Output) Program PNPM-M yaitu:

- a. terjadinya peningkatan keterlibatan rumah tangga miskin dan kelompok perempuan mulai perencanaan sampai dengan pelestarian
- b. terlembaganya sistem pembangunan partisipatif di desa dan antar desa

¹⁴ Term of refrence (TOR) Upk Pokja PNPM 2015

- c. terjadinya peningkatan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi pembangunan partisipatif
- d. berfungsi dan bermanfaatnya hasil kegiatan PNPM-MPd bagi masyarakat
- e. terlembaganya pengelolaan dana bergulir dalam peningkatan pelayanan sosial dasar dan ketersediaan akses ekonomi terhadap rumah tangga miskin
- f. terbentuk dan berkembangnya kerja sama antar desa dalam pengelolaan pembangunan
- g. terjadinya peningkatan peran serta dan kerja sama para pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan

Prinsip PNPM-M yaitu:

- a. bertumpu pada pembangunan manusia
- b. otonomi
- c. desentralisasi
- d. berorientasi pada masyarakat miskin
- e. partisipasi
- f. kesetaraan dan keadilan gender
- g. demokratis
- h. transparansi dan akuntabel
- i. prioritas
- j. keberlanjutan

Jenis kegiatan PNPM-M yaitu:¹⁵

- a. kegiatan pembangunan atau perbaikan sarana prasarana dasar yang dapat memberikan manfaat langsung secara ekonomi bagi rumah tangga miskin
- b. kegiatan peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan, termasuk kegiatan pelatihan pengembangan keterampilan masyarakat (pendidikan nonformal)
- c. kegiatan peningkatan kapasitas/keterampilan kelompok usaha ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis sumber daya lokal
- d. penambahan permodalan simpan pinjam khusus kelompok perempuan (SPP) Kriteria kegiatan PNPM-M antara lain:
 - a. lebih bermanfaat bagi rumah tangga miskin
 - b. berdampak langsung pada kesejahteraan
 - c. berpotensi untuk berkembang dan berkelanjutan
 - d. didukung sumber daya yang ada
 - e. bisa dikerjakan oleh masyarakat

Dasar hukum pelaksanaan PNPM-M adalah petunjuk umum PNPM-Mm 2007, mengacu pada landasan Pancasila dan landasan konstitusional UUD RI 1945 beserta amandemennya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang terkait sistem

¹⁵ Petunjuk teknis operasional PTO PNPM

pemerintahan, perencanaan, keuangan negara dan kebijakan penanggulangan kemiskinan serta landasan khusus pelaksanaan PNPM-M. Salah satu program dari PNPM-MPd yaitu pinjaman dana bergulir atau yang sering disebut dengan SPP (Simpan Pinjam Perempuan). Dana bergulir adalah seluruh dana program dan bersifat pinjaman dari UPK yang digunakan oleh masyarakat untuk mendanai kegiatan ekonomi masyarakat yang disalurkan melalui kelompok-kelompok masyarakat. Kegiatan pengelolaan dana bergulir PNPM-MPd bertujuan:¹⁶

- a. Memberikan kemudahan akses permodalan usaha baik kepada masyarakat sebagai pemanfaat maupun kelompok usaha
- b. Pelestarian dan pengembangan dana bergulir yang sesuai dengan tujuan progra
- c. Peningkatan kapasitas pengelola kegiatan dana bergulir di tingkat wilayah perdesaan
- d. Menyiapkan kelembagaan UPK sebagai pengelola dana bergulir yang mengacu pada tujuan program secara akuntabel, transparan dan berkelanjutan
- e. Peningkatan pelayanan kepada rumah tangga miskin dalam pemenuhan kebutuhan permodalan usaha melalui kelompok pemanfaat

¹⁶ Term of refrence (TOR) Upk Pokja PNPM 2015

Dalam memberikan dukungan terhadap masyarakat PNPM-MPd yang mempunyai tujuan percepatan penanggulangan kemiskinan maka kegiatan pengelolaan dana bergulir menjadi salah satu kegiatan yang memberikan kemudahan bagi rumah tangga miskin untuk mendapatkan permodalan dalam bentuk kegiatan SPP.¹⁷

Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam. Secara umum kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja. Tujuan khusus kegiatan ini yaitu:¹⁸

- a. Mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar
- b. Memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha
- c. Mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan

Ketentuan dasar kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yaitu: ¹⁹

¹⁷ FINAL Petunjuk Teknis Operasional PTO Bab 1_4 25 Oktober 2013

¹⁸ Ibid ,

¹⁹ FINAL Petunjuk Teknis Operasional PTO Bab 1_4 25 Oktober 2013

- a. Kemudahan, artinya masyarakat miskin dengan mudah dan cepat mendapatkan pelayanan pendanaan kebutuhan tanpa syarat agunan
- b. Terlembagakan, artinya dana kegiatan SPP disalurkan melalui kelompok yang sudah mempunyai tata cara dan prosedur yang baku dalam pengelolaan simpanan dan pengelolaan pinjaman
- c. Keberdayaan, artinya proses pengelolaan didasari oleh keputusan yang profesional oleh kaum perempuan dengan mempertimbangkan pelestarian dan pengembangan dana bergulir guna meningkatkan kesejahteraan
- d. Pengembangan, artinya setiap keputusan pendanaan harus berorientasi pada peningkatan pendapatan sehingga meningkatkan pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat perdesaan
- e. Akuntabilitas, artinya dalam melakukan pengelolaan dana bergulir harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat

Partisipasi kaum perempuan dalam usahanya meningkatkan perekonomian keluarga sekarang ini sudah dapat dilakukan secara luas oleh kaum perempuan di desa. Mereka dapat mengakses dana PNPM-MPd yang ada di UPK, sebagai modal kerja usaha. Peranan perempuan semakin aktif dalam semua tahapan program baik pada kegiatan

sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan atau pelestarian.²⁰

UPK juga sangat berperan penting di sini karena yang mengelola kegiatan program adalah UPK. Pengertian UPK menurut Petunjuk Teknis Operasional bahwa UPK adalah Unit Pengelola Kegiatan yang mengelola dana bantuan masyarakat, baik dari program pengembangan Kecamatan maupun PNPM-M yang dapat dialokasikan untuk berbagai jenis kegiatan yang mencakup kegiatan sarana prasarana, pendidikan, kesehatan, UEP dan SPP / dana bergulir.²¹

Peran UPK adalah sebagai unit pengelola dan operasional pelaksanaan kegiatan antar desa. UPK mendapatkan penugasan MAD/BKAD untuk menjalankan tugas pengelolaan dana program dan tugas pengelolaan dana perguliran.

Tugas dan tanggung jawab umum UPK:²²

- a. mengelola dana PPK maupun PNPM-M di Kecamatan
- b. mengelola administrasi dan pelaporan seluruh transaksi kegiatan PPK maupun PNPM-M
- c. mengelola dokumen-dokumen PPK maupun PNPM-M

²⁰ Term of refrence (TOR) Upk Pokja PNPM 2015

²¹ Ibid .

²² FINAL Petunjuk Teknis Operasional PTO Bab 1_4 25 Oktober 2013

- d. mengelola dana bergulir dan BLM yang dialokasikan untuk UEP dan atau SPP, maupun dari sumber lain dari program pemerintah dan swasta
- e. melakukan pembinaan terhadap kelompok peminja

Tugas dan tanggung jawab khusus UPK:²³

- a. melakukan sosialisasi dan penegakkan prinsip-prinsip PNPM-M dalam perencanaan dan pelestarian PNPM-M
- b. melakukan administrasi dan pelaporan setiap transaksi keuangan maupun nonkeuangan
- c. membuat perencanaan keuangan dan rencana kerja
- d. membuat pertanggungjawaban keuangan dan realisasi rencana kerja kepada MAD
- e. melakukan evaluasi dan pemeriksaan RPD serta LPD yang dibuat desa dalam setiap tahapan proses
- f. melakukan bimbingan teknis dan pemeriksaan administrasi pelaporan pelaku desa
- g. membuat draf rencana perguliran yang sesuai dengan prinsip dan mekanisme PNPM-M
- h. melakukan fasilitasi kerja sama dengan pihak lain dalam kaitannya dengan pengembangan potensi wilayah

²³ Ibid,

- i. melakukan penguatan kelompok peminjam dalam kelembagaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman dan memfasilitasi pengembangan usaha kelompok dan pemanfaat
- j. membantu pengembangan kapasitas pelaku program melalui pelatihan, bimbingan lapangan dan pendampingan dalam setiap tahap kegiatan
- k. mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman, perkembangan program dan informasi lainnya bersama pelaku lainnya melakukan fasilitasi penyelesaian masalah²⁴

3. Status sosial ekonomi

a. pengertian status sosial ekonomi

istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani *oikonomia*. Kata *oikonomia* berasal dari dua kata yaitu *oikos* dan *nomos*, *oikos* berarti rumah tangga, sedangkan *nomos* berarti mengatur. Jadi *oikonomia* berarti mengatur rumah tangga. Rumah tangga diartikan secara luas sebagai kesatuan kelompok sosial yang dianggap sebagai kesatuan kelompok manusia yang hidup menurut norma dan tata aturan tertentu.

Pengertian kata status adalah penempatan orang pada suatu jabatan tertentu. Selanjutnya pengertian kata sosial dalam ilmu sosial, kata ini menuju pada objeknya yaitu masyarakat. Sedangkan pada departemen sosial menunjukkan pada kegiatan yang ditunjukkan untuk mengatasi

²⁴ petunjuk teknis operasional PTO pnpm

persoalan yang dihadapi oleh masyarakat dalam bidang kesejahteraan yang ruang lingkup pekerjaan dan kesejahteraan sosial. dalam konsep sosiologi, manusia sering disebut sebagai makhluk sosial artinya manusia tidak dapat hidup sendiri, manusia memerlukan bantuan orang lain disekitarnya untuk bertahan hidup. Sehingga kata sosial sering diartikan sebagai hal-hal yang berkenaan dengan masyarakat. Menurut soerjono soekanto status sosial adalah “tempat seseorang secara umum dalam masyarakatnya sehubungan dengan orang-orang lain, dalam lingkungan pergaulannya.”²⁵

Majer mengartikan status sosial ekonomi adalah “kedudukan suatu individu dan keluarga berdasarkan unsur-unsur ekonomi.”²⁶

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian status sosial ekonomi orang tua adalah gambaran tentang keadaan orang tua yang ditinjau dari segi sosial ekonomi, gambaran itu seperti tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat pendapatan, pemilikan kekayaan, jenis tempat tinggal.

b. Factor factor yang mempengaruhi status sosial ekonomi

1) Pekerjaan

Pekerjaan akan menentukan status sosial ekonomi karena dari bekerja segala kebutuhan akan dapat terpenuhi. Pekerjaan tidak hanya mempunyai nilai ekonomi namun usaha manusia untuk mendapatkan

²⁵Soerjono, Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PTRaja Grafindo Persada, 2006). Hlm.210

²⁶ Ibid. hlm.207

kepuasan dan mendapatkan imbalan atau upah, berupa barang dan jasa akan terpenuhi kebutuhan hidupnya.²⁷

Pekerjaan seseorang akan mempengaruhi kemampuan ekonominya, untuk itu bekerja merupakan suatu keharusan bagi setiap individu sebab dalam bekerja mengandung dua segi, kepuasan jasmani dan terpenuhinya kebutuhan hidup. Dalam kaitan ini Soeroto memberikan definisi mengenai pekerjaan sebagai berikut :²⁸

Pekerjaan adalah kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa bagi diri sendiri atau orang lain, baik orang melakukan dengan dibayar atau tidak.

Dengan bekerja orang akan memperoleh pendapatan. Pendapatan ini memberikan kepadanya dan keluarganya untuk mengkonsumsi barang dan jasa hasil pembangunan dengan demikian menjadi lebih jelas, barang siapa yang mempunyai produktif, maka ia telah nyata berpartisipasi secara nyata dan aktif dalam pembangunan

2) Pendidikan

Pendidikan sangatlah penting peranannya dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan memiliki pendidikan yang cukup maka seseorang akan mengetahui mana yang baik dan mana yang dapat menjadikan seseorang menjadi berguna baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain yang membutuhkannya.

²⁷ Soekanto, Soerjono, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta Raja Grafindo Persada, 1990) hlm 146

²⁸ Ibid, Hlm. 167

Adapun pengertian pendidikan yang lebih jelas, dapat dilihat dalam pengertian-pengertian pendidikan yang diungkapkan oleh beberapa pakar pendidikan di bawah ini :

Pendidikan menurut Soerjono Soekanto :“Pendidikan merupakan suatu alat yang akan membina dan mendorong seseorang untuk berfikir secara rasional maupun logis, dapat meningkatkan kesadaran untuk menggunakan waktu sebaik-baiknya (seefektif dan seefisien mungkin) dengan menyerap banyak pengalaman mengenai keahlian dan keterampilan sehingga menjadi cepat tanggap terhadap gejala-gejala sosial yang terjadi”²⁹

“Pendidikan adalah segala perbuatan yang etis, kreatif, sistematis dan intensional dibantu oleh metode dan teknik ilmiah diarahkan pada pencapaian tujuan pendidikan tertentu”³⁰

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan adalah upaya untuk mengarah pada tercapainya perkembangan yang dapat merangsang suatu cara berfikir yang rasional, kreatif dan sistematis. Dengan pendidikan dapat memperluas keilmuan, meningkatkan kemampuan dan potensi serta membuat seseorang lebih peka terhadap setiap gejala-gejala sosial yang muncul.

²⁹ Ibid. hlm. 143.

³⁰Purbakawatja, Soegarda, *Pendidikan dalam Alam Indonesia Merdeka*(Jakarta, Gunung Agung,, 1970)

Mengenai tujuan pendidikan “ ialah membentuk manusia susila yang cakap dan warganegara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air ”³¹

Dengan pendidikan ini diharapkan dapat membuka pikiran seseorang untuk menerima hal-hal yang baru (sub culture baru) baik berupa teknologi, materi, sistem teknologi maupun berupa ide-ide baru serta bagaimana cara berfikir secara alamiah untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan dirinya, masyarakat dan tanah airnya.³²

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diulas beberapa fungsi dari pendidikan yang antara lain adalah ,Membina dan membentuk sikap mental seseorang, Menambah pengetahuan seseorang, Merangsang seseorang untuk berfikir logis, praktis dan sistematis dengan menggunakan metode-metode dan teknik-teknik ilmiah.

Pendidikan merupakan proses aktualisasi diri terhadap potensi kemampuan manusia untuk diwujudkan kedalam tujuan yang diinginkannya, serta pendidikan diarahkan kepada usaha-usaha pembangunan kepribadian bangsa, modernisasi terhadap lingkungan serta peningkatan terhadap kemampuan berfikir.

3) Pendapatan

Pendapatan akan mempengaruhi status sosial seseorang, terutama akan ditemui dalam masyarakat yang materialis dan

³¹ Ibid. hlm. 114.

³² Sudjana, D. Manajemen Program Pendidikan untuk Pendidikan Luar Sekolah. Bandung: Falah Production 2000. Hlm. 37

tradisional yang menghargai status sosial ekonomi yang tinggi terhadap kekayaan.

Biro Pusat statistic merinci pendapatan dalam kategori Pendapatan Pendapatan yang berupa barang yaitu Pembayaran upah dan gaji yang ditentukan dalam beras, pengobatan, transportasi, perumahan dan rekreasi.

Pendapatan yang berupa uang adalah segala penghasilan berupa uang yang sifatnya regular dan diterima biasanya sebagai balas atau kontra prestasi, sumbernya berasal dari :

- a) Gaji dan upah yang diterima dari gaji pokok, kerja sampingan, kerja lembur dan kerja kadang-kadang
- b) Usaha sendiri yang meliputi hasil bersih dari usaha sendiri, komisi, penjualan dari kerajinan rumah.
- c) Hasil investasi yakni pendapatan yang diperoleh dari hak milik tanah. Keuntungan serial yakni pendapatan yang diperoleh dari hak milik.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif, karena penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.³³ Penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif yaitu mendeskripsikan suatu objek, fenomena, atau latar sosial sasaran penelitian terejawantahkan dalam tulisan naratif. Artinya data maupun fakta yang telah dihimpun oleh peneliti kualitatif berbentuk kata atau gambar. Dalam menuangkan suatu tulisan, laporan penelitian kualitatif berisi kutipan-kutipan dari data atau fakta yang telah diungkap di lokasi penelitian untuk selanjutnya peneliti memberikan ilustrasi yang utuh dan untuk memberikan dukungan terhadap apa yang disajikan.³⁴

Data yang dihimpun dengan pengamatan yang seksama, mencakup deskripsi dalam konteks yang mendetail disertai catatan-catatan hasil wawancara yang mendalam serta hasil analisis dokumentasi.

Penelitian kualitatif ini mempunyai dua tujuan yakni pertama,

³³ Nana Syaيدoh Sukmadinata, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Rosdaya Karya, 2007), hlm. 60.

³⁴ M. Djunaidi Ghony, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012).
hlm 44-45

menggambarkan dan mengungkap (*to describe and explore*) dan kedua menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*).³⁵

Sedangkan jenis penelitiannya adalah menggunakan studi kasus. Studi kasus atau penelitian kasus adalah penelitian tentang subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas. Subjek penelitian bisa saja individu, kelompok, lembaga maupun masyarakat. Peneliti ingin mempelajari secara intensif latar belakang serta interaksi lingkungan dari unit-unit sosial yang menjadi subjek. Tujuan studi kasus adalah untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter-karakter yang khas dari kasus, ataupun status dari individu, yang kemudian dari sifat-sifat khas diatas akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum.³⁶

Jadi karena dalam penelitian ini menyangkut tentang implementasi program nasional pemberdayaan masyarakat pedesaan yang dirancang dengan menggunakan studi kasus, maka peneliti berusaha melihat secara mendalam tentang pelaksanaan dan dampak program tersebut di wilayah Kecamatan Tajinan malang

B. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, “ peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama”.³⁷ Peneliti

³⁵Nana Syaيدoh Sukmadinata, opcit, hlm 60

³⁶Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 66.

³⁷Lexy J, Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*, (Bandung; Remaja Rosdakarya, 2005), hlm 9.

sangat berperan sebagai penentu keseluruhan skenario, sehingga data lebih banyak bergantung pada peneliti. Kehadiran peneliti dapat dimaksudkan supaya mampu memahami kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan, terkait dengan obyek penelitian, sebab peneliti sekaligus perencana, pelaksana pengumpul data, analisis penafsir data dan pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya.³⁸

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan. Penelitian ini dilaksanakan di kantor unit pelaksana kegiatan dan beberapa desa yang menjadi sasaran program di wilayah Kecamatan Tajinan. Peneliti memilih Kecamatan Tajinan karena di Kecamatan tersebut terdapat pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat PNPM mandiri pedesaan dan peneliti sendiri juga termasuk sebagai pelaku dalam program pemberdayaan tersebut.

D. Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian kualitatif berupa kata-kata, tindakan dan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati, atau diwawancarai dan terdokumentasi merupakan sumber data utama dan dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekam video, audio, pengambilan foto dan film.³⁹

³⁸ Ibid, hlm 12.

³⁹ Ibid, hlm 157.

Karena itu, data penelitian berdasarkan fokus dan tujuan penelitian dengan paparan lisan, tertulis, dokumen, dan perbuatan yang menggambarkan fenomena tentang implementasi program pemberdayaan masyarakat PNPM mandiri pedesaan. Data penelitian akan terwujud dalam bentuk teks tertulis atau dokumen, pernyataan lisan (gagasan, ide, latar belakang, persepsi, pendapat) dan perbuatan.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari kata-kata yang digali dari para informan, dan juga dokumen yang tertulis serta rekaman perjalanannya. Yang dimaksud sumber data dalam penelitian menurut Suharsimi Arikunto adalah subjek di mana data diperoleh⁴⁰

Data yang dikaji dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

a) Data primer

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini menitik beratkan pada manusia, yaitu orang-orang yang dapat memberikan informasi tentang pelaksanaan program Nasional pemberdayaan masyarakat. Adapun sumber data tersebut terdiri dari: *pertama*, sumber data berupa orang (*person*), yaitu fasilitator kegiatan pelaksana kegiatan dan masyarakat yang menjadi sasaran. *Kedua*, sumber data berupa tempat (*place*)

⁴⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta; PT. Rineka Cipta, 2006), hlm 129.

misalnya kantor unit pelaksana kegiatan, kinerja pelaku pemberdayaan serta keadaan lokasi dan kondisi masyarakat sasaran penelitian. Dan yang *ketiga*, sumber data berupa simbol (*paper*), yaitu dokumen-dokumen seperti program kerja. Dan capaian program yang telah di laksanakan.

b) Data sekunder

Data sekunder adalah data yang biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen, misalkan data mengenai masalah yang dibahas oleh peneliti (makalah, jurnal, literature buku).

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian yang dilaksanakan menggunakan beberapa cara pengumpulan data selama proses penelitian berlangsung, diantaranya sebagai berikut:

a. Metode Observasi

Bentuk alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi atau pengamatan yang meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu objek dengan penggunaan seluruh alat indra.⁴¹

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis, mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Observasi sebagai alat pengumpul data

⁴¹ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 157.

yang dapat dilakukan secara spontan dapat pula dengan daftar isian yang telah disiapkan sebelumnya.⁴²

Dengan teknik ini peneliti harus berusaha dapat diterima sebagai orang dalam responden, karena teknik ini memerlukan hilangnya kecurigaan para subjek penelitian.⁴³ Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode observasi agar dapat melihat secara langsung kondisi Masyarakat dan pelaksanaan serta keberlangsungan program di wilayah Kecamatan Tajinan.

b. Metode Wawancara (Interview)

Salah satu pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, yaitu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada para informan, dan kegiatannya dilakukan secara lisan, selain itu peneliti membawa instrument lain sebagai pedoman untuk wawancara seperti tape recorder, gambar, brosur dan material.⁴⁴ Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) memperoleh informan dari terwawancara (*interview*) interview digunakan peneliti untuk menilai keadaan seseorang misalnya, untuk mencari data tentang variable latar belakang siswa, orang tua, pendidikan, sikap terhadap sesuatu.⁴⁵ Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara bukan hanya

⁴² Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*,(Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hlm. 63.

⁴³ Hamidi, *Metode penelitian Kualitatif* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Pers, 2004), hlm. 72.

⁴⁴Sugiono, *opcit*,.hlm. 139.

⁴⁵Ibid, hlm. 155.

kepada kepala desa atau pelaku program pemberdayaan PNPM mandiri pedesaan di tingkat desa maupun tingkat Kecamatan tetapi juga melakukan wawancara beberapa warga yang menjadi sasaran program. Peneliti menggunakan metode wawancara untuk memperkuat penelitian dari apa yang sudah di observasi oleh peneliti mengenai fenomena yang ada dengan metode wawancara tersebut.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu metode pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda dan sebagainya⁴⁶. Adapun dokumentasi yang dipakai peneliti dengan tujuan untuk melengkapi data dan observasi dan wawancara. Dokumen yang digunakan peneliti untuk memperoleh data yang berkaitan dengan teknis operasional program pemberdayaan, keadaan dan jumlah pelaku program pemberdayaan, rancangan kegiatan program, keadaan dan jumlah sasaran program pemberdayaan, agenda rapat koordinasi atau berbagai musyawarah dan data lain dalam lembaga adalah foto ketika berlangsungnya kegiatan. Adapun dokumentasi ini digunakan untuk membuktikan dengan valid adanya temuan yang sudah dikumpulkan peneliti dengan meyakinkan melalui dokumentasi ini

⁴⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm 206.

F. Analisis Data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar foto, dan sebagainya.⁴⁷ Dalam proses analisis data peneliti menggunakan teknik reflektif thinking yaitu dengan mengkombinasikan antara berfikir induktif dan deduktif. Peneliti mula-mula bergerak dari fakta khusus menuju statemen umum yang menunjukkan fakta-fakta itu dan dari statemen yang bersifat umum tersebut peneliti menyelidiki lagi fakta umum untuk mengecek statemen itu. Peneliti melakukan itu sampai diperoleh pernyataan-pernyataan yang memberi keyakinan tentang objek persoalan tersebut.⁴⁸ Hal ini dapat menghubungkan antara idealitas dengan itu tidak terdapat jarak.

Langkah-langkah analisis menurut Milles dan Huberman adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penulis untuk mengumpulkan data

⁴⁷Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), hlm 247.

⁴⁸Sutrisno Hadi, *Metodologi Research 1*, (Yogyakarta: Andi Offseat, 1989), hlm 46.

selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.⁴⁹ adapun reduksi data ini peneliti akan merangkum dan memilih hal-hal yang mengenai kegiatan kegiatan peningkatan setatus sosialekonomi masyarakat

b. Display Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar, kategori, flowchart, dan sejenisnya, sehingga memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.⁵⁰ Berangkat dari mereduksi data pada bagian awal kemudian peneliti menyajikan apa yang sudah direduksinya mengenai status sosial ekonomi masyarakat kecamatan tajinan

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid, dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁵¹ Dengan demikian setelah peneliti dapat menyajikan data yang sudah ditemukan. Maka peneliti akan mudah

⁴⁹Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*,(Bandung; Alfa Beta, 2008), hlm 247.

⁵⁰Ibid, hlm 249.

⁵¹ Ibid, hlm 259.

menyimpulkannya mengenai setatus sosial ekonomi masyarakat kecamatan tajinan

G. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian diperlukan suatu teknik pemeriksa keabsahan data yang didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Sedangkan untuk memperoleh keabsahan temuan perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Pengecekan Teman Sejawat

Teknik pengecekan teman sejawat ini bermanfaat di dalam membentuk kepercayaan, hal ini merupakan proses menunjukkan diri sendiri kepada teman-teman peneliti yang merasa tidak tertarik dalam suatu acara membuat paralel pembahasan analitis dan untuk tujuan menyelidiki aspek-aspek dari inkuiri; apabila tidak demikian akan tetap implisit pada pemikiran peneliti. Sedangkan tujuan dari kegiatan pelaksanaan pengecekan teman sejawat adalah (1) proses tersebut membantu menjaga peneliti untuk selalu tetap jujur; (2) memberikan satu awal permulaan dan mengusahakan kesempatan untuk menguji hipotesis yang sedang berjalan, yang mungkin muncul dalam benak pikiran peneliti yang masuk akal dan secara sempurna; (3) memberikan kesempatan untuk mengembangkan langkah-langkah selanjutnya dalam desain metodologis yang muncul; (4) memberikan kesempatan pada peneliti untuk merasakan secara mendalam, dan karenanya untuk menjernihkan pikiran atau emosi serta perasaan yang mungkin sedang

mengaburkan pertimbangan yang baik atau untuk mencegah langkah-langkah berikutnya.⁵²

b. Triangulasi

Pengecekan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang digunakan peneliti ialah pemeriksaan melalui sumbernya. Triangulasi dengan sumber berarti peneliti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.⁵³ Misalnya data diperoleh dengan wawancara, kemudian dicek dengan observasi, dan dokumentasi.

c. Meningkatkan Ketekunan

Dalam penelitian kualitatif ketekunan pengamatan peneliti sangat diperlukan, untuk menentukan ciri-ciri fenomena atau gejala sosial dalam situasi yang sangat relevan, sehingga peneliti dapat memusatkan perhatian secara rinci dan mendalam.⁵⁴

H. Prosedur Penelitian

Tahap-tahap pada penelitian secara umum terdiri dari tahap pra-lapangan, tahap kerja, dan tahap analisis data.

⁵² Djunaidi Ghony&Fauzan Almanshur, *op. cit*, hlm. 324.

⁵³ Lexy J. Meleong, *op. cit*, hlm. 330.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 329.

1. Tahap pra-lapangan

Pada tahap pra-lapangan ini kegiatan yang harus dilakukan peneliti kualitatif, yang mana dalam tahapan ini ditambah dengan satu pertimbangan yang perlu dipahami, yaitu etika penelitian lapangan. Sedangkan kegiatan dan pertimbangan tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut:

a. Menyusun rancangan penelitian

Rancangan penelitian ini akan dijabarkan tersendiri secara detail, agar mudah dimengerti, dan selanjutnya dapat dijadikan patokan oleh peneliti kualitatif.

b. Memilih lokasi penelitian

Memilih lokasi penelitian diarahkan oleh substantif yang dirumuskan dalam bentuk hipotesis kerja walaupun masih tentatif sifatnya. Hipotesis kerja itu baru akan dirumuskan secara tetap setelah dikonfirmasi dengan data yang muncul ketika peneliti sudah memasuki latar penelitian. Dalam penentuan lokasi peneliti perlu untuk mempertimbangkan waktu, biaya, tenaga yang dimiliki peneliti kualitatif. Dengan mempertimbangkan bahwa Program Pemberdayaan PNPM mandiri pedesaan Di Kecamatan Tajinan Malang memiliki tempat yang strategis dan terjangkau oleh peneliti maka peneliti memilih untuk melakukan penelitian di Kecamatan Tajinan Malang

c. Mengurus perizinan penelitian

Pertama-tama yang perlu diketahui oleh peneliti ialah siapa saja yang berwenang memberikan izin pelaksana penelitian tersebut.

d. Menjaki dan menilai lokasi penelitian

Berusaha mengenal segala unsur lingkungan sosial, fisik, dan keadaan alam. Jika peneliti telah mengenalnya, maksud dan tujuan lainnya adalah membuat peneliti mempersiapkan diri, mental maupun fisik serta menyiapkan peralatan yang diperlukan.

e. Memilih dan memanfaatkan informan

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Kegunaan informan bagi peneliti adalah membantu agar secepatnya dan tetap seteliti mungkin dapat memendamkan diri dalam konteks setempat terutama bagi peneliti yang belum mengalami latihan etnografi.

f. Menyiapkan perlengkapan penelitian

Peneliti harus sejauh mungkin menyiapkan segala alat dan perlengkapan penelitian. Sebelum melakukan sebuah penelitian, peneliti memerlukan izin mengadakan penelitian.

g. Persoalan etika penelitian

Dalam penelitian harus menggunakan etika melakukan wawancara atau observasi sehingga peneliti tidak sampai menyinggung perasaan para objek peneliti.

h. Tahap Pekerjaan Lapangan

Tahap ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- 1) Mengadakan observasi langsung
- 2) Memasuki lapangan, dengan mengamati berbagai fenomena dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat PNPM dalam meningkatkan status sosial ekonomi masyarakat DiKecamatan Tajinan
- 3) Menyusun laporan penelitian berdasarkan hasil data yang diperoleh

Dalam tahap ini peneliti menganalisis data-data yang sudah terkumpul dengan menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu analisis data diskriptif kualitatif seperti yang diungkapkan di atas.

i. Tahap penulisan laporan

Langkah terakhir dalam setiap kegiatan penelitian adalah laporan penelitian. Dalam tahap ini peneliti menulis laporan penelitian dengan menggunakan rancangan penyusunan laporan penelitian yang telah tertera dalam sistematika penulisan laporan penelitian.

a. Tahap Pekerjaan Lapangan

Tahap ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:⁵⁵

- 1) Memahami latar penelitian dan persiapan diri.
- 2) Memasuki lapangan, dengan mengamati berbagai fenomena yang terjadi dilapangan.
- 3) Berperan serta sambil mengumpulkan data.

b. Tahap analisis data

Dalam tahap ini peneliti menganalisis data-data yang sudah terkumpul dengan menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu analisis data deskriptif kualitatif seperti yang diungkapkan di atas.⁵⁶

c. Tahap penulisan laporan

Langkah terakhir dalam setiap kegiatan penelitian adalah laporan penelitian. Dalam tahap ini peneliti menulis laporan penelitian dengan menggunakan rancangan penyusunan laporan penelitian yang telah tertera dalam sistematika penulisan laporan penelitian.⁵⁷

⁵⁵ Lexy J. Meleong, *op. cit*, hlm. 137.

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 248.

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 361.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Kondisi Masyarakat

Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, Kecamatan Tajinan secara administratif terbagi atas 12 Desa yaitu: Desa Tajinan, Desa Gunungsari, Desa Gunungronggo, Desa Purwosekar, Desa Ngawonggo, Desa Pandanmulyo, Desa Randugading, Desa Sumbersuko, Desa Tangkilsari, Desa Tambakasri, Desa Jambearjo Desa Jatisari. Jumlah Penduduk Kecamatan Tajinan sejumlah 50.891 jiwa yang terdiri laki laki sejumlah 24.985 jiwa dan perempuan sejumlah 25.906 jiwa dengan kepadatan penduduk rata rata 20.674 jiwa per km penduduk sebanyak 50.685 Jiwa atau 12.672 Kepala Keluarga (KK). Sebanyak 2.576 KK (20,32%) dikategorikan sebagai Rumah tangga Miskin (RTM). Mata pencaharian utama masyarakat disini adalah petani.

Kecamatan Tajinan merupakan salah satu dari 33 Kecamatan di Wilayah Kabupaten Malang, dengan batas-batas

- Utara : Kecamatan Tumpang
- Timur : Kecamatan Poncokusumo
- Selatan : Kecamatan Wajak dan Bululawang
- Barat : Kecamatan Kedungkandang Kota Malang

Secara umum Kecamatan Tajinan sebagai salah satu dari 33 Kecamatan di wilayah Kabupaten Malang, terletak sebelah Timur 12 km dari ibu kota / pusat pemerintahan Kabupaten Malang dan berjarak + 102 km dari ibu kota Propinsi Jawa Timur, serta ketinggian wilayah Kecamatan Tajinan dari permukaan laut + 478 M dengan suhu maksimum 29° C, minimum 18° C, sedangkan curah hujan 1.300 mm / tahun. Luas Kecamatan Tajinan ± 40,661 KM2 dengan perincian sebagai berikut :

Tanah Sawah	:	1.645.500	Ha
Tanah Tegal	:	1.067.441	Ha
Tanah Pekarangan	:	718.740	Ha
Pemukiman Penduduk	:	485.864	Ha
Lain – lain	:	99.100	Ha

Kecamatan ini telah berpartisipasi dalam PNPM Mandiri Perdesaan sejak tahun 2008 . Hingga saat ini, Kecamatan Tajinan telah mendapatkan dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) sebesar Rp 7.950.000.000,-. Dana tersebut dikelola secara mandiri oleh masyarakat melalui UPK Kecamatan Tajinan. Berikut akumulatif dana BLM yang dikelola UPK.

Berdasarkan pengamatan peneliti saat melakukan observasi yang melihat kondisi status sosial ekonomi masyarakat secara langsung dari segi material kondisi bangunan rumah rumah warga di beberapa dusun di Kecamatan Tajinan yaitu di dusun yang dekat dengan pusat pemerintahan dan

mudah di jangkau dari segi apapun tidak memiliki perbedaan yang signifikan terjadinya kesenjangan sosial dan ekonomi dengan dusun yang jauh dari pusat pemerintahan.⁵⁸

Dari pengamatan tersebut dapat di lihat bahwa tingkat kesejahteraan penduduk dari beberapa desa di Kecamatan Tajinan relatif hampir sama karena dari duabelas desa memiliki kelemahan dan keunggulan masing masing sesuai potensi dan pemanfaatan masyarakat setempat. Hal ini sesuai dari pemaparan pada saat wawancara oleh bapak Drs. Haryanto M.Si

“Kalau kondisi status ekonomi dari masyarakat di dua belas desa di Kecamatan Tajinan ini hampir sama. Karena setiap desa mendapat perhatian yang sama dari pemerintah, dan juga setiap desa mempunyai keunggulan masing masing khususnya dalam bidang pertanian, kalau tingkat pendidikan masyarakat juga bervariasi rata rata sudah menyelesaikan SMP, yang terbanyak secara global berpendidikan SMA, ya banyak juga yang sudah sarjana, untuk rumah tangga miskin saat ini sudah semakin sedikit mungkin kurang dari 20% dari jumlah penduduk karena banyak juga program dan bantuan dari pemerintah.”⁵⁹

Kondisi ekonomi masyarakat juga di Hal ini sesuai dari pemaparan pada saat wawancara oleh bapak Suja'i selaku perangkat desa randugading yang termasuk bagian dari Kecamatan Tajinan

“Ya seperti ini mas bisa dilihat dari kondisi lingkungannya, karena warga di sini kebanyakan mempunyai mata pencaharian yang sama yang di tekuninya, ya kebanyakan sebagai petani dan buruh kalau tidak buruh pabrik ya buruh bangunan tapi juga agak banyak yang berwirausaha. Untuk rumah tangga miskin tidak terlalu banyak hanya terdapat beberapa, dan bisa dilihat di petapen duduk yang sudah terdapat kategorinya. Diperta ini bisa di lihat untuk keluarga yang berwarna merah hijau adalah keluarga kelas atas, yang berwarna

⁵⁸ Hasil pengamatan observasi pada tanggal 7 september 2016 di Kecamatan Tajinan

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Drs hariyanto, M.Si selaku Kaur kemasayarakatan, saat kunjungan di kantor UPK, Hari Rabu 7 september 2016, Jam 11.30 WIB

merah muda adalah kelas menengah dan yang kuning adalah kelas bawah dari segi status sosial ekonominya.”⁶⁰

2. Bentuk dan Jenis Kegiatan

Mulai tahun 2007 Pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal. PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Pendekatan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan PPK adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat.

3. Visi Misi PNPM Mandiri Perdesaan

Visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan.

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Suja'1 selaku Perangkat desa randugading Tajinan, di balai desa randugading , Hari Rabu 7 september 2016, Jam 1.30 WIB

Misi PNPM Mandiri Perdesaan adalah:

1. peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya;
2. pelebagaandan pengintegrasian pembangunan partisipatif;
3. pengefektifan fungsi dan peran pemerintahan lokal,
4. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat;
5. pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.

Dalam rangka mencapai visi dan misi PNPM Mandiri Perdesaan, strategi yang dikembangkan PNPM Mandiri Perdesaan yaitu menjadikan masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran, menguatkan sistem dan pengintegrasian pembangunan partisipatif, serta mengembangkan kelembagaan kerja sama antar desa. Berdasarkan visi, misi, dan strategi yang dikembangkan, maka PNPM Mandiri Perdesaan lebih menekankan pentingnya pemberdayaan sebagai pendekatan yang dipilih. Melalui PNPM Mandiri Perdesaan diharapkan masyarakat dapat menuntaskan tahapan pemberdayaan yaitu tercapainya kemandirian dan keberlanjutan, setelah tahapan pembelajaran dilakukan melalui Program Pengembangan

4. Tujuan Program

Tujuan Umum PNPM Mandiri Perdesaan adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan yang berkelanjutan. Tujuan khususnya meliputi:

- a. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan dan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan.
- b. Menyatupadukan sistem pembangunan partisipatif model PNPM MPd dan program sejenis ke dalam sistem pembangunan regular
- c. Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan rnendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam lokal dengan mempertimbangkan kelestariannya;
- d. Mengembangkan kapasitas kelembagaan masyarakat,
- e. pemerintahan khususnya pemerintahan desa dalam fasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif yang berwawasan lingkungan
- f. Menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat
- g. Melembagakan pengelolaan dana bergulir
- h. Mendorong terbentuk dan berkembangnya kerjasama antar desa
- i. Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan dan perbaikan lingkungan hidup.

4. Prinsip Dasar Pnpm Mandiri Perdesaan

Pedoman urnum, PNPM Mandiri Perdesaan mempunyai prinsip atau nilai-nilai dasar yang selalu menjadi landasan atau acuan dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan yang akan diarnbil dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. Nilai-nilai dasar

tersebut diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan PNPM Mandiri Perdesaan. Prinsip-prinsip itu meliputi:

- a. Bertumpu pada pembangunan manusia. Pengertian prinsip bertumpu pada pembangunan manusia adalah masyarakat hendaknya memilih kegiatan yang berdampak langsung terhadap upaya pembangunan manusia daripada pembangunan fisik semata;
- b. Otonomi. Pengertian prinsip otonomi adalah masyarakat memiliki hak dan kewenangan mengatur diri secara mandiri dan bertanggung jawab, tanpa intervensi negatif dari luar;
- c. Desentralisasi. Pengertian prinsip desentralisasi adalah memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengelola kegiatan penyelarasan pembangunan sektoral dan antar desa yang bersumber dari pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kapasitas masyarakat;
- d. Berorientasi pada masyarakat miskin. Pengertian prinsip berorientasi pada masyarakat miskin adalah segala keputusan yang diambil berpihak kepada masyarakat miskin;
- e. Partisipasi. Pengertian prinsip partisipasi adalah masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran.

- f. Kesetaraan dan keadilan gender. Pengertian prinsip kesetaraan dan keadilan gender adalah masyarakat baik laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahapan program dan dalam menikmati manfaat kegiatan pembangunan, kesetaraan juga dalam pengertian kesejajaran kedudukan pada saat situasi konflik
- g. Demokratis. Pengertian prinsip demokratis adalah masyarakat mengambil keputusan pembangunan secara musyawarah dan mufakat
- h. Transparansi dan Akuntabel. Pengertian prinsip transparansi dan akuntabel adalah masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administrative
- i. Prioritas. Pengertian prinsip prioritas adalah masyarakat memilih kegiatan yang diutamakan dengan mempertimbangkan kemendesakan dan kemanfaatan untuk pengentasan kemiskinan dan upaya perbaikan lingkungan;
- j. Keterpaduan, keselarasan dan kesatupaduan kebijakan. Pengertian prinsip ini menekankan bahwa arah kebijakan dan atau tindakan dari berbagai aspek kegiatan program lebih menekan sistem penyalarsan perencanaan politik, teknokratis dengan tetap mengacu pada perencanaan partisipatif yang diintegrasikan kedalam sistem reguler;
- k. Keberlanjutan. Pengertian prinsip keberlanjutan adalah bahwa dalam setiap pengambilan keputusan atau tindakan pembangunan, mulai dari

tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan kegiatan harus telah mempertimbangkan sistem pelestariannya.

Program PNPM Mandiri merupakan program pembangunan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintahan daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hal yang dicapai. Pelaksanaan program pembangunan partisipatif seperti PNPM Mandiri menuntut peranserta dari seluruh aspek dalam kehidupan masyarakat itu sendiri serta dari pemerintah daerah atau relawan demi kelancaran proses pembangunan.

Dalam pelaksanaan program PNPM Mandiri di Kecamatan Tajinan, PNPM Mandiri merangkul elemen dalam pempayarakan tidak sekadar sebagai objek tetapi juga untuk menjadi mitra kerja atau sebagai subjek pengembangan. Dengan kata lain pelibatan lembaga-lembaga dan tokoh masyarakat untuk menampung aspirasi masyarakat secara langsung agar dapat diketahui potensi dan permasalahan

pembagnunan yang ada dalam masyarakat untuk selanjutnya masyarakat bisa lebih mengorganisasi dirinya dan membangun lembaga pimpinan kloektif sebagi representasi dari warga masyarakat karena bantuan yang di berikan oleh program pemberdayaan in bersifat stimulan, untuk

menstimulasi kebedayaan dan kemandirian masyarakat. Berikut adalah kriteria dan jenis jenis kegiatan yang di kelola:⁶¹

- a. Kegiatan yang akan dibiayai melalui dana BLM dan dana bergulir diutamakan untuk kegiatan yang memenuhi kriteria:
 - 1) Lebih bermanfaat bagi masyarakat miskin atau rumah tangga miskin,
 - 2) Memenuhi kebutuhan antar desa dan atau antar Kecamatan:
 - 3) Berdampak langsung dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja bagi masyarakat miskin;
 - 4) Berdampak langsung terhadap perkembangan ekonomi perdesaan;
 - 5) Dapat dikerjakan oleh masyarakat;
 - 6) Didukung oleh sumber daya yang ada:
 - 7) Memiliki potensi berkembang dan berkelanjutan;
 - 8) Mendukung kualitas lingkungan hidup dengan tidak merusak lingkungan
- b. Jenis-jenis kegiatan yang dibiayai melalui BLM PNPM Mandiri Perdesaan adalah sebagai berikut:
 - 1) Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana sarana dasar yang dapat memberikan manfaat jangka pendek rnaupun jangka panjang secara ekonomi bagi masyarakat miskin atau rumah tangga miskin di dalam desa atau antar desa/kelurahan atau sebutan lainnya,

⁶¹ Dokumentasi jenis jenis kegiatan yang di kelola UPK

- 2) Kegiatan peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan. termasuk kegiatan pelatihan pengembangan ketrampilan masyarakat (pendidikan nonformal);
- 3) Kegiatan peningkatan kapasitas/ketrampilan kelompok usaha ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis sumber daya lokal (tidak termasuk penambahan modal);
- 4) Penambahan permodalan simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP);
- 5) Kegiatan Usulan Pengganti bagi lokasi Kecamatan yang tidak memenuhi kriteria bisa mengajukan dana SPP, mencakup pembiayaan, penyediaan sarana atau prasarana usaha dan modal kerja yang dilakukan oleh kelompok usaha yang dikelola oleh perempuan;
- 6) Kegiatan pembangunan atau perbaikan sarana dan prasarana yang berhubungan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Kegiatan dari PNPM yang di kelola oleh unit pelaksana kegiatan di Kecamatan Tajinan sebagai upaya peningkatan status sosial ekonomi masyarakat di antaranya meliputi bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan pembangunan sarana infrastruktur masyarakat. Prasarana (Pengerasan Jalan, Air Bersih, MCK, Infrastruktur Lain-lain) Modal SPP, Paket Spp permodalan Pendidikan, Pembangunan Gedung Sekolah, Rehab Gedung Sekolah, Paket Beasiswa) Kesehatan (Pembangunan Gedung Kesehatan, Rehab Gedung Kesehatan, Paket fasilitas kesehatan, Paket PMT) seperti dalam hasil

wawancara Bapak Suharwanto ketua UPK Kecamatan Tajinan dan hasil dokumentasi berupa tabel profil kegiatan yang di kelola UPK Kecamatan tajinan

“Kegiatan yang kami kelola di sini seperti yang telah di tetapkan pada saat perencanaan oleh masyarakat melalu berbagai musyawarah desa maupun antar desa, yang meliputi bidang Infrastrukurur desa, bidang ekonomi, bidang pendidikan, dan bidang kesehatan . infrastruktur desa meliputi air berih , pengerasan jalan, sarana MCK, dan infrastruktur lainnya . bidang ekonomi terdapat permodalan SPP , bdang pendidikan pemberian paket beasiswa, pembangunan gedung dan rehab gedung sekolah. Dan bidang kesehatan terdapat pemberian paket PMT yang di barengkan saat posyandu, paket fasilitas kesehatan,dan rehab gedung kesehatan.”⁶²

3. Implementasi kegiatan PNPM

Kecamatan Tajinan telah berpartisipasi dalam PNPM Mandiri Perdesaan sejak tahun 2008 . Hingga saat ini, Kecamatan Tajinan telah mendapatkan dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) dan Dana tersebut dikelola secara mandiri oleh masyarakat melalui UPK Kecamatan Tajinan. Dana tersebut untuk mendanai kegiatan kegiatan yang di selenggarakan di di duabelas desa yang ada di Kecamatan tajinan yang di sambut dengan baik oleh seluruh masyarakat hingga saat ini. Seperti hasil wawancara Bapak Asyrofi S.Pd,I FasKec PNPM Mandiri Pedesaan Kab. Malang

“Mengenai program PNPM Mandiri Pedesaan ini, sambutan masyarakat cukup baik, apalagi dengan adanya rencana kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat itu sendiri, jadi kita sebagai fasilitator usulan – usulan itu kita memang start dari awal bahwa usulan–usulan yang didanai itu adalah hasil kesepakatan masyarakat, sehingga nantinya masyarakat memiliki rasa gotong – royong, kepedulian terhadap hasil program serta mengutamakan asas manfaat dalam melaksanakan program ini.”⁶³

⁶² Hasil wawancara dengan Bapak Suharwanto Ketua Upk Kecamatan Tajinan, di Ruang Guru, Hari Rabu 20 Maret 2016, Jam 11.30 WIB

⁶³Hasil wawancara dengan Bapak M. Asyrofi, S.Pdi selaku faslitator Kecamatan, di kantor upk Tajinan, Hari Rabu 7 september 2016, Jam 10.30 WIB

Program PNPM Mandiri merupakan program pembangunan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari peran serta masyarakat dan perangkat pemerintahan daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hal yang dicapai. Pelaksanaan program pembangunan partisipatif seperti PNPM Mandiri menuntut peranserta dari seluruh aspek dalam kehidupan masyarakat itu sendiri serta dari pemerintah daerah atau relawan demi kelancaran proses pembangunan. Hal ini seperti yang di paparkan, oleh Bapak Rendi selaku pendamping lokal kegiatan:

“dalam pelaksanaan kegiatannya ini butuh dukungan dari banyak pihak supaya program dapat berjalan dengan lancar dan tepat sasaran, disini kegiatannya itu bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan fisik. Misalnya dalam bidang pendidikan bekerjasama dengan UPTD pendidikan, kalau bidang kesehatan bekerjasama dengan puskesmas, bidang ekonomi bekerjasama dengan kepala desa seKecamatan Tajinan dan Tim verifikasi . ya pihak pihak yang terkait itu yang sekaligus menjadi stake holder supaya terjamin keberlangsungannya karena bantuan langsung masyarakat (BLM) yang di berikan merupakan stimulan saja”⁶⁴

Dalam pelaksanaan program PNPM Mandiri di Kecamatan Tajinan, PNPM Mandiri merangkul elemen dalam masyarakat tidak sekadar sebagai objek tetapi juga untuk menjadi mitra kerja atau sebagai subjek pengembangan. Dengan kata lain pelibatan lembaga-lembaga dan tokoh masyarakat untuk menampung aspirasi masyarakat secara langsung agar dapat diketahui

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Rendi, selaku pendamping lokal kegiatan PNPM di kantor upk Tajinan, Hari Rabu 7 september 2016, Jam 10.30 WIB

potensi dan permasalahan. Berikut adalah kriteria dan jenis jenis kegiatan yang di kelola.⁶⁵

Tahapan pelaksanaan Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan diawali dengan Perencanaan kegiatan meliputi tahap persiapan dan sosialisasi awal, serta perencanaan di desa, di Kecamatan, dan di kabupaten. Tahap persiapan dan sosialisasi awal dimulai dari MAD Sosialisasi sampai dengan pelatihan KPMD/K. Perencanaan kegiatan di desa, dimulai dengan tahap penggalian gagasan sampai dengan musdes perencanaan atau dikenal dengan istilah Menggagas Masa Depan Desa (MMDD). Perencanaan kegiatan di Kecamatan dimulai dengan MAD prioritas usulan sampai dengan MAD penetapan usulan. Perencanaan kegiatan di kabupaten adalah perencanaan koordinatif, dimulai dari keterlibatan utusan Kecamatan dalam forum SKPD sampai dengan musrenbang kabupaten. Adapun tahapan – tahapan musyawarah dalam proses perencanaan kegiatan ini seperti yang dijelaskan dalam dokumen petunjuk teknis yang didapatkan oleh peneliti saat observasi di kantor UPK di adalah sebagai berikut:⁶⁶

a. Musyawarah Antar Desa (MAD) Sosialisasi

MAD sosialisasi merupakan pertemuan antar desa untuk sosialisasi awal tentang tujuan, prinsip, kebijakan, prosedur maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan PNPM Mandiri Perdesaan serta untuk menentukan kesepakatan-kesepakatan antar desa dalam melaksanakan PNPM

⁶⁵ Dokumentasi jenis jenis kegiatan yang di kelola UPK

⁶⁶ Dokumentasi, FINAL petunjuk teknis oprasional (PTO) pnpm 2013

Mandiri Perdesaan. Dalam proses MAD hasil yang diharapkan yakni memahami cara pengambilan keputusan di tingkat desa atau antar desa, utamanya menyangkut pemilihan kegiatan, keputusan pendanaan, dan mekanisme penyaluran dana BLM dan dana pendukung lainnya, cara pemetaan RTM dan kegunaannya,

Dalam pelaksanaan MAD Sosialisasi hal yang perlu untuk dipahami juga tentang konsep BKAD, cara penanganan masalah, pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi, serta pola penyampaian informasi, Dipahaminya perencanaan partisipatif di desa dengan menggunakan pola MMDD sebagai panduan penyusunan RPJMDes, serta rencanaprogram/proyek kabupaten atau pihak lain yang akan dilaksanakan di desa.

Agenda dalam MAD sosialisasi pun juga menentukan kesepakatan-kesepakatan antar desa seperti disepakatinya mekanisme musyawarah antar desa termasuk terpilihnya ketua rapat, pokok-pokok kesepakatan dalam penyelenggaraan musyawarah, dan penetapan anggota tim perumus, jadwal kegiatan musyawarah desa sosialisasi dari tiap desa dan rencana pelaksanaan musyawarah antar desa prioritas usulan, waktu penyusunan detail desain dan RAB usulan kegiatan

b. Musyawarah Desa (Musdes) Sosialisasi

Musdes sosialisasi merupakan pertemuan masyarakat desa sebagai ajang sosialisasi atau penyebarluasan informasi PNPM Mandiri

Perdesaan di desa, seperti Tersosialisasinya informasi pokok PNPM Mandiri Perdesaan, keputusan yang dihasilkan dalam musyawarah antar desa sosialisasi, Adanya pernyataan kesanggupan atau kesedian desa mematuhi dan melaksanakan ketentuan PNPM Mandiri Perdesaan, konsep dan kebijakan, perencanaan kegiatan dengan pola Menggagas Masa Depan Desa (MMDD) sebagai dasar penyusunan RPJMDes, pola pemantauan, pemeriksaan, dan evaluasi, dipahaminya kebijakan tentang pemetaan RTM, pembentukan BKAD, penanganan masalah, pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi, pola penyampaian informasi.

Dimana dalam musdes sosialisasi juga dilaksanakan proses pemilihan Pengurus TPK terdiri dari; Ketua, Sekretaris, dan Bendahara, ditetapkannya BPD sebagai lembaga pengawas pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di desa, dibentuk tim pemantau dari unsur masyarakat untuk melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, dan dipilih dan ditetapkannya KPMD atau kader desa dan kader teknik yang akan memfasilitasi masyarakat dalam menyelenggarakan proses PNPM Mandiri Perdesaan.

c. Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

KPMD yang telah terpilih dalam musyawarah desa sosialisasi, akan memandu serangkaian tahapan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan yang diawali dengan proses penggalan gagasan di tingkat dusun dan kelompok masyarakat. Sebelum melakukan tugasnya, KPMD akan mendapat

pelatihan. Agar KPMD dapat paham akan latar belakang, tujuan, prinsip, kebijakan dan tahapan atau mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan, pahami akan peran dan tugasnya. Bertambahnya keterampilan melakukan teknik fasilitasi pertemuan masyarakat dalam tahapan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, termasuk perencanaan secara partisipatif, Bertambahnya keterampilan memberikan pendampingan dan pembimbingan kepada masyarakat agar mampu mengelola PNPM Mandiri Perdesaan secara mandiri, dan Bertambahnya kemampuan administrasi dan pelaporan yang diperlukan.

d. Musyawarah Penggalan Gagasan

Musyawarah penggalan gagasan adalah pertemuan kelompok-kelompok/dusun untuk menemukan gagasan-gagasan sesuai kebutuhan masyarakat terutama RTM. Gagasan-gagasan yang disampaikan oleh masyarakat tidak sekedar gagasan kegiatan yang diajukan dalam rangka mendapatkan dana PNPM Mandiri Perdesaan, tetapi berupa gagasan-gagasan dalam kaitan langsung penanggulangan kemiskinan. Musyawarah penggalan gagasan dilakukan dengan memanfaatkan pertemuan rutin kelompok yang sudah ada (formal maupun informal). Bahan yang diperlukan adalah peta sosial dusun, daftar rumah tangga miskin dan sangat miskin di dusun berikut kriterianya, serta lembar diagram Venn kelembagaan.

e. Musyawarah Desa Khusus Perempuan (MKP)

MKP dihadiri oleh kaum perempuan dan dilakukan dalam rangka membahas gagasan-gagasan dari kelompok-kelompok perempuan dan menetapkan usulan kegiatan yang merupakan kebutuhan desa. Usulan disampaikan perlu mempertimbangkan hasil penggalian gagasan yang telah dilakukan sebelumnya. Usulan hasil musyawarah tersebut selanjutnya dilaporkan ke musyawarah desa perencanaan untuk disahkan sebagai bagian dari usulan desa, dimana gagasan yang berasal dari MKP inilah yang menjadi prioritas usulan dalam Musdes Perencanaan nantinya.

f. Musdes Perencanaan

Musdes perencanaan merupakan pertemuan masyarakat di desa yang bertujuan untuk membahas seluruh gagasan kegiatan, hasil dari proses penggalian gagasan di kelompok-kelompok/dusun. Bahan-bahan yang harus disiapkan adalah peta desa hasil penggabungan semua peta dusun, rekap data RTM dusun, diagram Venn kelembagaan, rekap gagasan semua dusun, rekap masalah semua dusun, dan usulan kelompok perempuan.

Hasil yang diharapkan dari Musdes Perencanaan adalah Terumuskannya visi desa yang dibuat berdasarkan proses sebelumnya yang berasal dari penggalian gagasan dan MKP, Berdasarkan tabel penggalian gagasan, memiliki dan menetapkan satu usulan kegiatan sarana prasarana dasar atau kegiatan peningkatan kualitas hidup

masyarakat (kesehatan atau pendidikan) dan peningkatan kapasitas kelompok-kelompok usaha ekonomi Terpilih dan ditetapkannya Tim Penulis Usulan, Tim Pemelihara. Terpilihnya sekurang-kurangnya satu orang yang akan diusulkan menjadi calon pengurus UPK dan calon amat pada musyawarah antar desa prioritas usulan, Terpilihnya wakil-wakil desa yang akan hadir dalam musyawarah antar desa prioritas usulan.

g. Penulisan usulan Desa

Penulisan usulan merupakan kegiatan untuk menguraikan secara tertulis gagasan-gagasan kegiatan masyarakat yang sudah disetujui sebagai usulan desa yang akan diajukan pada MAD. Proses ini dilakukan oleh TPU yang telah dipilih dalam musyawarah desa perencanaan.

Sebelum melakukan penulisan, TPU akan mendapatkan pelatihan atau penjelasan terlebih dahulu dari F-Kec/ FT-Kec. Hasil yang diharapkan dari tim penulis usulan adalah tiga proposal kegiatan berdasarkan Musdes Perencanaan yang akan diajukan ke MAD Prioritas Usulan, serta dokumen-dokumen yang diperlukan untuk musrenbang reguler, termasuk RPJMDes dan RKPDes.

Pengajuan usulan oleh desa harus disertai dengan desain sederhana, yaitu berupa gambar dari usulan kegiatan secara umum dengan perkiraan besaran pembiayaannya. Desa juga dapat mengajukan usulan dengan dilengkapi desain detail dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

h. Verifikasi Usulan

Verifikasi usulan merupakan tahap kegiatan yang bertujuan untuk memeriksa dan menilai kelayakan usulan kegiatan dari setiap desa untuk didanai PNPM Mandiri Perdesaan. Verifikasi usulan kegiatan dilakukan oleh Tim Verifikasi yang dibentuk di Kecamatan dengan beranggotakan sekurang-kurangnya lima orang yang memiliki keahlian sesuai usulan kegiatan.

Sebelum menjalankan tugasnya TV akan mendapatkan pelatihan atau penjelasan terlebih dulu dari FK/FT atau Fasilitator Kabupaten. TV harus memberi umpan balik di desa sebelum menyusun rekomendasi kelayakan usulan. Rekomendasi penilaian kelayakan usulan diperiksa oleh FK/FT, terutama yang berkaitan dengan aspek teknis usulan kegiatan. Selanjutnya, TV membuat rekomendasi hasil penilaian disertai dengan catatan hasil pemeriksaan oleh FK/FT. Rekomendasi TV akan menjadi dasar pembahasan dalam MAD Prioritas Usulan. Proses verifikasi dapat dilihat lebih lanjut dalam penjelasan VI PTO.

i. MAD Prioritas Usulan

MAD prioritas usulan adalah pertemuan di Kecamatan yang bertujuan membahas dan menyusun peringkat usulan kegiatan. Penyusunan peringkat didasarkan atas kriteria kelayakan sebagaimana yang digunakan oleh TV dalam menilai usulan kegiatan. Penyusunan prioritas usulan-usulan SPP dilakukan secara terpisah sebelum

penyusunan prioritas usulan-usulan desa lainnya. Pada pelaksanaan MAD Prioritas Usulan juga berlangsung proses pemilihan pengurus UPK (Ketua, Sekretaris, Bendahara), beserta dengan Disampaikan laporan pertanggungjawaban tahunan UPK (bila UPK sudah terbentuk).

Disepakatinya sanksi-sanksi yang akan diterapkan selama pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan tersebut, juga dibahas dalam MAD Prioritas Usulan beserta Disampaikannya keputusan desa-desa yang bersepakat untuk membentuk BKAD sekaligus deklarasi pembentukan BKAD, disampaikannya usulan-usulan desa yang akan diajukan dan didanai dari sumber lain (APBD, ADD, dan pihak ketiga lain) dan dirumuskannya dokumen prioritas kegiatan pembangunan Kecamatan (renstra Kecamatan) dari hasil dokumen RPJMdes yang telah dirumuskan pada Musdes Perencanaan.

j. Musyawarah Antar Desa (MAD) Penetapan Usulan

MAD penetapan usulan merupakan musyawarah untuk mengambil keputusan terhadap usulan yang akan didanai dan berapah jumlah dana yang akan dibiayai melalui PNPM Mandiri Perdesaan. Keputusan pendanaan harus mengacu pada peringkat usulan yang telah dibuat pada saat MAD prioritas usulan. Jika pada saat MAD prioritas usulan, seluruh usulan telah selesai dibuat berikut detail desain dan RABnya, maka keputusan penetapan usulan yang akan dibiayai melalui PNPM Mandiri Perdesaan bisa langsung diselenggarakan setelah agenda MAD prioritas usulan

diselesaikan. Namun jika belum selesai desain dan RABnya, maka MAD penetapan usulan dilakukan pada waktu yang berbeda.

Pada pelaksanaan MAD Penetapan Usulan juga disepakati tentang pemberlakuan sanksi lokal, jadwal pelaksanaan kegiatan setiap desa, rancangan AD-ART BKAD menjadi ketetapan AD/ART BKAD. Penyusunan AD-ART BKAD ini sendiri dilakukan setelah MAD prioritas usulan. Serta prioritas kegiatan pembangunan Kecamatan yang dapat diajukan sebagai renstra Kecamatan, sekaligus utusan Kecamatan yang nantinya mewakili masyarakat dalam Forum SKPD. Dan disampaikannya informasi tentang status kontribusi pendanaan kabupaten

Dokumen yang dihasilkan: Berita acara hasil musyawara, Daftar usulan yang didanai, RKTTL pelaksanaan, Renstra Kecamatan, AD-ART BKAD.

Adapun para Peserta MAD baik itu dari pelaksanaan MAD Sosialisasi, MAD Prioritas Usulan sampai MAD Penetapan Usulan terdiri dari Enam orang wakil per desa: Kepala desa, dua orang wakil dari BPD/nama lain yang sejenis (jika sudah ada), dan tigaorang tokoh masyarakat (minimal tiga dari keenam wakil tersebut adalah perempuan) dari semua desa di Kecamatan.

Secara umum unsur-unsur yang hadir dalam MAD adalah: Camat dan staf terkait, Wakil dari seluruh instansi sektoral kecamatan (ISK), Kades di lingkungan Kecamatan, BPD atau sebutan

lainnya, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Wakil RTM dari setiap desa, Wakil perempuan dari setiap desa, Komite sekolah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/Organisasi, Massa (ormas), Tokoh masyarakat, tokoh agama, Anggota masyarakat lainnya yang berminat untuk hadir.

Hasil dari keputusan MAD penetapan usulan disahkan sesegera mungkin oleh Camat atas nama Bupati menjadi Surat Penetapan Camat (SPC) yang berisi tentang daftar alokasi bantuan PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan yang bersangkutan. SPC berikut lampirannya, mencantumkan nama desa, jenis kegiatan termasuk jumlah alokasi dananya, dikirimkan oleh PjOK kepada TK PNPM Mandiri Kabupaten dengan tembusan kepada Bupati, FK/T dan Fasilitator Kabupaten.

k. Musdes Informasi Hasil MAD

Musdes ini merupakan musyawarah sosialisasi atau penyebarluasan hasil penetapan alokasi dana PNPM Mandiri Perdesaan yang diputuskan dalam MAD penetapan usulan. Musdes ini dilaksanakan baik di desa yang mendapatkan dana maupun yang tidak. Khusus bagi desa-desa yang mendapatkan dana PNPM Mandiri Perdesaan, Dalam musdes dilaksanakan pemilihan dan penetapan nan lengkap TPK, yaitu ketua-ketua bidang sesuai dengan jenis

kegiatan yang didanai, Terbentuknya Tim Pemantau yang akan memantau pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan, disosialisasikannya jadwal pelaksanaan tiap kegiatan yang akan dilaksanakan, disosialisasikannya sanksi-sanksi yang akan diberlakukan selama pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di desa tersebut, disepakatinya rencana realisasi sumbangan termasuk kompensasi lahan atau aset lain masyarakat, disepakatinya besarnya insentif bagi pekerja (per HOK) dan tata cara pembayarannya.

Dalam musdes ini juga mendapatkan sosialisasi tentang pembentukan BKAD beserta AD/ART yang telah ditetapkan pada MAD penetapan usulan, mekanisme pengadaan bahan dan alat, Disampaikannya kemajuan penanganan masalah dan rencana tindak lanjutnya.

Kegiatan dari PNPM yang di kelola oleh unit pelaksana kegiatan di Kecamatan Tajinan sebagai upaya peningkatan status sosial ekonomi masyarakat di antaranya meliputi bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan pembangunan sarana infrastruktur masyarakat. Prasarana(Pengerasan Jalan, Air Bersih, MCK, Infrastruktur Lain-lain) Modal SPP, Paket Spp permodalan) Pendidikan,Pembangunan Gedung Sekolah,Rehab Gedung Sekolah,Paket Beasiswa)Kesehatan (Pembangunan Gedung Kesehatan, Rehab Gedung Kesehatan, Paket fasilitas kesehatan, Paket PMT) seperti dalam hasil wawancara Bapak Suharwantoketua UPK Kecamatan Tajinan

dan hasil dokumentasi berupa tabel profil kegiatan yang di kelola UPK

Kecamatan tajian

“Kegiatan yang kami kelola di sini seperti yang telah di tetapkan pada saat perencanaan oleh masyarakat melalu bermagai musyawarah desa maupun antar desa, yang meliputi bidang Infrastruktur desa, bidang ekonomi, bidang pendidikan, dan bidang kesehatan . infrastruktur desa meliputi air berih , pengerasan jalan, sarana MCK, dan infrastruktur lainnya . bidang ekonomi terdapat permodalan SPP , bidang pendidikan pemberian paket beasiswa, pembangunan gedung dan rehab gedung sekolah. Dan bidang kesehatan terdapat pemberian paket PMT yang di barengkan saat posyandu, paket fasilitas kesehatan, dan rehab gedung kesehatan.”⁶⁷

Kegiatan kegiatan yang telah di kelola unit pelaksana kegiatan Kecamatan Tajinan

NO	TAHUN	APBN	APBD KABUPATEN	JUMLAH BLM	SWADAYA	PERSENTASE SWADAYA
1	2009	800,000,000	200,000,000	1,000,000,000	234,783,975	23%
2	2010	1,600,000,000	400,000,000	2,000,000,000	493,317,650	25%
3	2011	480,000,000	120,000,000	600,000,000	50,702,050	8%
4	2012	997,500,000	52,500,000	1,050,000,000	52,355,300	5%
5	2013	1,092,500,000	57,500,000	1,150,000,000	33,623,500	3%
6	2014	1,092,500,000	57,500,000	1,150,000,000	43,525,500	4%
JUMLAH		6,062,500,000	887,500,000	6,950,000,000	908,307,975	13%

Tabel. 4.1

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Suharwanto Ketua Upk Kecamatan Tajinan, di upk kecamatan Tajinan, Hari Rabu 7 september 2016,

Dalam tabel di atas adalah pendanaan kegiatan bantuan langsung masyarakat yang telah berjalan mulai tahun 2009 sampai dengan 2014 dalam kolom tersebut terdapat swadaya masyarakat karena bantuan langsung masyarakat (BLM) yang di berikan merupakan stimulant sehingga dapat memancing kepedulian masyarakat membangun daerahnya sendiri Swadaya adalah kernaun dan kemampuan masyarakat yang disumbangkan sebagai bagian dari rasa ikut memiliki terhadap program. Swadaya masyarakat merupakan salah satu wujud partisipasi dalam pelaksanaan tahapan PNPM Mandiri Perdesaan. Swadaya bisa diwujudkan dengan menyumbangkan tenaga, dana, maupun material pada saat pelaksanaan kegiatan. Dasar keswadayaan adalah kerelaan masyarakat, sehingga harus dipastikan babas dari tekanan atau keterpaksaan

Dari dana bantuan langsung yang di berikan langsung melalui PNPM dan swadaya masyarakat dapat di laksanakan beberapa kegiatan dari usulan yang di rencanakan sebelumnya oleh masyarakat meliputi kegiatan bidang ekonomi pelatihan keterampilan masyarakat, pendidikan (gedung TK, gedung PAUD) kesehatan dan fisik atau infrastruktur (Drainase, Jalan Aspal, Pipanisasi Air Bersih, Jalan Telford, Talud, Jalan Rabat Beton, T P T) yang telah di paparkan dalam table berikut:

NO	Jenis Kegiatan	2009	2010	2011	2012	2013	2014	TOTAL
1	Drainase	325 m	875 m	1.253 m		1.748 m		4.201 m
2	Jalan Aspal	4150 m	1.124 m		2.004 m	388 m		7.666 m
3	Pipanisasi Air Bersih	2100 m	8.900 m	1.900 m	2.794 m			15.694m
4	Jalan Telford	1200 m		350 m	2.640 m			4.190 m
5	Talud		425 m			1.820 m	2.862 m	5.107 m
6	Jalan Rabat Beton		250 m	871 m		747 m	824 m	2.692 m
7	T P T		27 m				760 m	787 m
8	Gedung TK	1 unit	1 unit					2 unit
9	Gedung PAUD	1 unit						1 unit
10	Pelatihan					1 paket	1 paket	2 paket

Tabel. 4.2

4. Dampak Program Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri

Dampak yang terjadi dengan adanya program PNPM Mandiri di Kelurahan Sekaran meliputi: dampak fisik, dampak sosial dan dampak ekonomi. Hal ini dapat terlihat dari program-program yang di selenggarakan PNPM Mandiri di kelurahan sekaran antara lain :

a. Dampak fisik

Dari pengamatan Kegiatan yang dilakukan oleh peneliti saat observasi lapangan di Kecamatan Tajinan peneliti menjumpai diantaranya berupa pengerasan jalan antar dusun randugading srigading

dan ngembulsari.⁶⁸ Dampak dari program pengerasan jalan adalah perbaikan akses bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat untuk memudahkan masyarakat yang mayoritas petani lebih mudah akses menuju ke perkebunan. Dan akses jalan antar desa yang memudahkan masyarakat dan dapat di nikmati langsung oleh masyarakat

Kegiatan lain yang dilaksanakan PNPM Mandiri di Kecamatan Tajinan adalah pembuatan talud (drainase) pada jalan jalan antar desa jala yang telah di perbaiki . Dampak dari program pembuatan talud (drainase) adalah agar permukaan jalan tidak tergenang air akibat hujan. Sehingga jalan yang dibangun bisa nyaman di lalui dalam kondisi apapun. Hal ini seperti di ungkapkan bapak supriyanto salah satu warga:

“Ada pembangunan talud ini sangat membantu soalnya ketika hujan deras parit yang ada d jalan sering tersumbat dan tidak menampung air hujan. Ya itu mas kadang airnya menggenang di jalan ketika lewat saat hujan kan mengganggu pengguna jalan, setelah di bangun talud tidak menggenang lagi”⁶⁹

b. Dampak Sosial

kegiatan peningkatan kapasitas pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu, kegiatan ini berupa pemberian paket fasilitas kesehatan pemberian PMT pada saat posyandu dan juga pemberian paket beasiswa kegiatan lain yang juga di lakukan yaitu, pembangunan gedung sekolah, rehab gedung kesehatan dan rehab

⁶⁸ Hasil pengamatan lapangan saat observasi pada tanggal 7 September 30, 2016

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Suharwanto Ketua Upk Kecamatan Tajinan, di upk kecamatan Tajinan, Hari Rabu 8 september 2016

gedung sekolah , dampak dari program ini adalah memfasilitasi masyarakat miskin mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan dengan mudah dan dapat di rasakan langsung oleh masyarakat. hal ini seperti yang di ungkapkan oleh ibu Rumanah selaku kader pemberdayaan (KPMD) di desa randugading:

“Bantuan langsung masyarakat yang di berikan pnpm ini di desa kami itu ada pembangunan gedung sekolah TK, renovasi gedung kesehatan Polindes dan pemberian tenda untuk taman posyandu juga pemberian paket alat kesehatan hal ini sangat dirasakan oleh masyarakat yang kurang mampu untuk mengakses kesehatan”

c. Dampak ekonomi

Kegiatan Ekonomi yang dilakukan dalam program PNPM Mandiri berbentuk paket permodalan , yakni pemberian pinjaman modal usaha ke masyarakat dengan system pembayaran berangsur dan tanggung renteng. Sasarannya adalah kelompok masyarakat yang memiliki usaha- usaha produktif. Dampak dari program ekonomi bergulir adalah , warga yang semula kekurangan modal mendapat bantuan modal untuk mengembangkan usahanya. Hal ini sesuai dengan dengan hasil wawancara dengan bapak Suharwanto selaku kepala UPK Kecamatan Tajinan.:

“Salah satu kegiatan pemberdayaan ekonomin yang di kelola unit pelaksana kegiatan yaitu memberikan permodalan pada usaha-usaha kecil masyarakat untuk lebih berkembang. Kalau di Kecamatan Tajinan sendiri seperti usaha home industri, para pengrajin anyaman, jaket kulit, dan masih banyak lagi mas. Disini kami memberikan pinjaman modal kepada usaha usaha yang sudah berjalan saja dengan angsuran yang ringan dan tanpa memberkan jaminan pinjaman dan

proses yang mudah tidak seperti ketika melakukan pinjaman di bank.”⁷⁰

Kegiatan lain yang dilaksanakan PNPM Mandiri di Kecamatan Tajinan adalah program pemberian bantuan permodalan usaha kepada warga yang kurang mampu. Khususnya pada kelompok perempuan yaitu berupa bantuan permodalan simpan pinjam khusus perempuan (SPP). Dampak dari program permodalan SPP adalah warga yang kurang mampu dapat mempunyai pekerjaan dan bisa di jadikan sebagai tambahan modal usaha. Hal ini seperti yang di ungkapkan bapak M. Asyrofi S.Pd,I selaku fasilitator Kecamatan

“Salah satu dari program PNPM Mandiri di sekaran yaitu sosial produktif salah satu programnya yaitu paket spp permodalan usaha , program pemberian bantuan permodalan kepada warga yang kurang mampu untuk mengembangkan jiwa wira usaha adalah hak mereka untuk bisa di kembangkan lagi, untuk hasilnya bisa memanfaatkan untuk membuka usaha baru atau mengembangkan usaha tersebut” beberapa usaha anggota kelompok pemanfaat SPP yang paling berkembang ada Usaha Keripik Nangka milik Bu Tumiasih kelompok Anyelir di desa Gunungronggo, Usaha Pembuatan Rengginang milik Bu Listari kelompok Dahlia di desa Tangkilsari.Usaha Kue Muaco milik Bu Yuli kelompok Anyelir di desa Tajinan⁷¹

Dana SPP di Kecamatan ini umumnya dimanfaatkan warga untuk penambahan modal usaha, mengembangkan jiwa wira usaha, menghindari pinjaman dari rentenir. Usaha anggota/ kelompok penerima manfaat SPP paling berkembang dan membanggakan di Kecamatan ini adalah: ⁷²

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Suharwanto Ketua Upk Kecamatan Tajinan, di upk kecamatan Tajinan, Hari Rabu 8 september 2016

⁷¹ Hasil wawancara dengan Bapak M. Asyrofi, S.PdI selaku faslitator Kecamatan, di kantor upk Tajinan, Hari Rabu 7 september 2016, Jam 10.30 WIB

⁷² Hasil dokumentasi kelompok spp di UPK tajinan

Usaha Keripik Nangka milik Bu Tumiasih kelompok Anyelir di desa Gunungronggo. Keunggulan dari usaha/ kegiatan ini adalah Memanfaatkan potensi hasil alam yang ada di desa serta mengurangi jumlah pengangguran desa Gunungronggo, Sudah diakui dan diberi ijin dari Dinas Kesehatan..

Usaha Pembuatan Rengginang milik Bu Listari kelompok Dahlia di desa Tangkilsari. Keunggulan dari usaha/ kegiatan ini adalah Produk Rengginang ini telah beredar luas di pasaran. Karena Sudah Terkenal dengan Rasanya, maka permintaan Pasar akan produk ini sangat banyak. Sehingga Hampir pembuatan produk ini sudah dilaksanakan oleh ibu – ibu hampir satu desa Tangkilsari

Usaha Kue Muaco milik Bu Yuli kelompok Anyelir di desa Tajinan. Keunggulan dari usaha/ kegiatan ini adalah Bahwa Produk seperti ini di pasarkan di kota Malang dan Keluar Kota..

Dari beberapa usaha kelompok permodalan SPP di Kecamatan Tajinan berhasil mengembangkan usaha rumahan masyarakat dan meningkatkan perekonomian yang di stimulus oleh bantuan pormodalan dari program pemberdayaan masyarakat PNPM mandiri pedesaan

B. Hasil penelitian

1. Kondisi Masyarakat

Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, Kecamatan Tajinan secara administratif terbagi atas 12 Desa yaitu: Desa Tajinan, Desa Gunungsari, Desa Gunungronggo, Desa Purwosekar, Desa Ngawonggo, Desa Pandanmulyo, Desa Randugading, Desa Sumbersuko, Desa

Tangkilsari, Desa Tambakasri, Desa Jambearjo Desa Jatisari. Jumlah Penduduk Kecamatan Tajinan sejumlah 50.891 jiwa yang terdiri laki laki sejumlah 24.985 jiwa dan perempuan sejumlah 25.906 jiwa dengan kepadatan penduduk rata rata 20.674 jiwa per km penduduk sebanyak 50.685 Jiwa atau 12.672 Kepala Keluarga (KK). Sebanyak 2.576 KK (20,32%) dikategorikan sebagai Rumahtangga Miskin (RTM). Mata pencaharian utama masyarakat disini adalah petani.

Kecamatan Tajinan merupakan salah satu dari 33 Kecamatan di Wilayah Kabupaten Malang, dengan batas-batas

- Utara : Kecamatan Tumpang
- Timur : Kecamatan Poncokusumo
- Selatan : Kecamatan Wajak dan Bululawang
- Barat : Kecamatan Kedungkandang Kota Malang

Secara umum Kecamatan Tajinan sebagai salah satu dari 33 Kecamatan di wilayah Kabupaten Malang, terletak sebelah Timur 12 km dari ibu kota / pusat pemerintahan Kabupaten Malang dan berjarak + 102 km dari ibu kota Propinsi Jawa Timur, serta ketinggian wilayah Kecamatan Tajinan dari permukaan laut + 478 M dengan suhu maksimum 29° C, minimum 18° C, sedangkan curah hujan 1.300 mm / tahun. Luas Kecamatan Tajinan ± 40,661 KM² dengan perincian sebagai berikut :

Tanah Sawah : 1.645.500 Ha

Tanah Tegak	:	1.067.441	Ha
Tanah Pekarangan	:	718.740	Ha
Pemukiman Penduduk	:	485.864	Ha
Lain – lain	:	99.100	Ha

Kecamatan ini telah berpartisipasi dalam PNPM Mandiri Perdesaan sejak tahun 2008 . Hingga saat ini, Kecamatan Tajinan telah mendapatkan dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) sebesar Rp 7.950.000.000,-. Dana tersebut dikelola secara mandiri oleh masyarakat melalui UPK Kecamatan Tajinan. Berikut akumulatif dana BLM yang dikelola UPK.

Berdasarkan pengamatan peneliti saat melakukan observasi yang melihat kondisi status sosial ekonomi masyarakat secara langsung dari segi material kondisi bangunan rumah rumah warga di beberapa dusun di Kecamatan Tajinan yaitu di dusun yang dekat dengan pusat pemerintahan dan mudah di jangkau dari segi apapun tidak memiliki perbedaan yang signifikan terjadinya kesenjangan sosial dan ekonomi dengan dusun yang jauh dari pusat pemerintahan.⁷³

Dari pengamatan tersebut dapat di lihat bahwa tingkat kesejahteraan penduduk dari beberapa desa di Kecamatan Tajinan relatif hampir sama karena dari duabelas desa memiliki kelemahan dan keunggulan masing masing sesuai potensi dan pemanfaatan masyarakat setempat.

⁷³ Hasil pengamatan observasi pada tanggal 7 september 2016 di Kecamatan Tajinan

2. Bentuk dan Jenis Kegiatan

Mulai tahun 2007 Pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal. PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Pendekatan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan PPK adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat.

Visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan.

Misi PNPM Mandiri Perdesaan adalah:

6. peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya;
7. pelembagaan dan pengintegrasian pembangunan partisipatif;
8. pengefektifan fungsi dan peran pemerintahan lokal,

9. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat;
10. pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.

Dalam rangka mencapai visi dan misi PNPM Mandiri Perdesaan, strategi yang dikembangkan PNPM Mandiri Perdesaan yaitu menjadikan masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran, menguatkan sistem dan pengintegrasian pembangunan partisipatif, serta mengembangkan kelembagaan kerja sama antar desa. Berdasarkan visi, misi, dan strategi yang dikembangkan, maka PNPM Mandiri Perdesaan lebih menekankan pentingnya pemberdayaan sebagai pendekatan yang dipilih. Melalui PNPM Mandiri Perdesaan diharapkan masyarakat dapat menuntaskan tahapan pemberdayaan yaitu tercapainya kemandirian dan keberlanjutan, setelah tahapan pembelajaran dilakukan melalui Program Pengembangan

Tujuan Umum PNPM Mandiri Perdesaan adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan yang berkelanjutan. Tujuan khususnya meliputi:

- j. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan dan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan.

- k. Menyatupadukan sistem pembangunan partisipatif model PNPM MPd dan program sejenis ke dalam sistem pembangunan regular
- l. Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan rnendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam lokal dengan mempertimbangkan kelestariannya;
- m. Mengembangkan kapasitas kelembagaan masyarakat,
- n. pemerintahan khususnya pemerintahan desa dalam fasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif yang berwawasan lingkungan
- o. Menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat
- p. Melembagakan pengelolaan dana bergulir
- q. Mendorong terbentuk dan berkembangnya kerjasama antar desa
- r. Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan dan perbaikan lingkungan hidup.

Pedoman urnum, PNPM Mandiri Perdesaan mempunyai prinsip atau nilai-nilai dasar yang selalu menjadi landasan atau acuan dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan yang akan diarnbil dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. Nilai-nilai dasar tersebut diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan PNPM Mandiri Perdesaan. Prinsip-prinsip itu meliputi:

- a. Bertumpu pada pembangunan Inanusia. Pengertian prinsip bertumpu pada pembangunan manusia adalah masyarakat hendaknya memilih

kegiatan yang berdampak langsung terhadap upaya pembangunan manusia daripada pembangunan fisik semata

- b. Otonomi. Pengertian prinsip otonomi adalah masyarakat memiliki hak dan kewenangan mengatur diri secara mandiri dan bertanggung jawab, tanpa intervensi negatif dari luar
- c. Desentralisasi. Pengertian prinsip desentralisasi adalah memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengelola kegiatan penyalarsan pembangunan sektoral dan antar desa yang bersumber dari penerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kapasitas masyarakat
- d. Berorientasi pada masyarakat miskin. Pengertian prinsip berorientasi pada masyarakat miskin adalah segala keputusan yang diambil berpihak kepada masyarakat miskin
- e. Partisipasi. Pengertian prinsip partisipasi adalah masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran.
- f. Kestaraan dan keadilan gender. Pengertian prinsip kestaraan dan keadilan gender adalah masyarakat baik laki-laki dan perempuan mempunyai kestaraan dalam perannya di setiap tahapan program dan dalam menikmati manfaat kegiatan pernbangunan,kestaraan juga dalam pengertian kesejajaran kedudukan pada saat situasi konflik
- g. Demokratis Pengertian prinsip demokratis adalah masyarakat mengambil keputusan pembangunan secara musyawarah dan mufakat

- h. **Transparansi dan Akuntabel.** Pengertian prinsip transparansi dan akuntabel adalah masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administrative
- i. **Prioritas.** Pengertian prinsip prioritas adalah masyarakat memilih kegiatan yang diutamakan dengan mempertimbangkan kemendesakan dan kemanfaatan untuk pengentasan kemiskinan dan upaya perbaikan lingkungan
- j. **Keterpaduan, keselarasan dan kesatupaduan kebijakan.** Pengertian prinsip ini menekankan bahwa arah kebijakan dan atau tindakan dari berbagai aspek kegiatan program lebih menekan sistem penyalarsan perencanaan politik, teknokratis dengan tetap mengacu pada perencanaan partisipatif yang diintegrasikan kedalam sistem reguler
- k. **Keberlanjutan.** Pengertian prinsip keberlanjutan adalah bahwa dalam setiap pengambilan keputusan atau tindakan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan kegiatan harus telah mempertimbangkan sistem pelestariannya.

Program PNPM Mandiri merupakan program pembangunan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintahan daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hal yang dicapai. Pelaksanaan program pembangunan partisipatif

seperti PNPM Mandiri menuntut peranserta dari seluruh aspek dalam kehidupan masyarakat itu sendiri serta dari pemerintah daerah atau relawan demi kelancaran proses pembangunan.

Dalam pelaksanaan program PNPM Mandiri di Kecamatan Tajinan, PNPM Mandiri merangkul elemen dalam masyarakat tidak sekadar sebagai objek tetapi juga untuk menjadi mitra kerja atau sebagai subjek pengembangan. Dengan kata lain pelibatan lembaga-lembaga dan tokoh masyarakat untuk menampung aspirasi masyarakat secara langsung agar dapat diketahui potensi dan permasalahan

pembangunan yang ada dalam masyarakat untuk selanjutnya masyarakat bisa lebih mengorganisasi dirinya dan membangun lembaga pimpinan kolektif sebagai representasi dari warga masyarakat karena bantuan yang di berikan oleh program pemberdayaan ini bersifat stimulan, untuk menstimulasi kebedayaan dan kemandirian masyarakat. Berikut adalah kriteria dan jenis jenis kegiatan yang di kelola:

- a. Kegiatan yang akan dibiayai melalui dana BLM dan dana bergulir diutamakan untuk kegiatan yang memenuhi kriteria:
 - 1) Lebih bermanfaat bagi masyarakat miskin atau rumah tangga miskin,
 - 2) Memenuhi kebutuhan antar desa dan atau antar Kecamatan:

- 3) Berdampak langsung dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja bagi masyarakat miskin;
 - 4) Berdampak langsung terhadap perkembangan ekonomi perdesaan;
 - 5) Dapat dikerjakan oleh masyarakat;
 - 6) Didukung oleh sumber daya yang ada;
 - 7) Memiliki potensi berkembang dan berkelanjutan;
 - 8) Mendukung kualitas lingkungan hidup dengan tidak merusak lingkungan
- b. Jenis-jenis kegiatan yang dibiayai melalui BLM PNPM Mandiri Perdesaan adalah sebagai berikut:
- 1) Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana sarana dasar yang dapat memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang secara ekonomi bagi masyarakat miskin atau rumah tangga miskin di dalam desa atau antar desa/kelurahan atau sebutan lainnya,
 - 2) Kegiatan peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan. termasuk kegiatan pelatihan pengembangan ketrampilan masyarakat (pendidikan nonformal);
 - 3) Kegiatan peningkatan kapasitas/ketrampilan kelompok usaha ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan

produksi berbasis sumber daya lokal (tidak termasuk penambahan modal);

- 4) Penambahan permodalan simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP);
- 5) Kegiatan Usulan Pengganti bagi lokasi Kecamatan yang tidak memenuhi kriteria bisa mengajukan dana SPP, mencakup pembiayaan, penyediaan sarana atau prasarana usaha dan modal kerja yang dilakukan oleh kelompok usaha yang dikelola oleh perempuan;
- 6) Kegiatan pembangunan atau perbaikan sarana dan prasarana yang berhubungan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Kegiatan dari PNPM yang di kelola oleh unit pelaksana kegiatan di Kecamatan Tajinan sebagai upaya peningkatan status sosial ekonomi masyarakat di antaranya meliputi bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan pembangunan sarana infrastruktur masyarakat. Prasarana (Pengerasan Jalan, Air Bersih, MCK, Infrastruktur Lain-lain) Modal SPP, Paket Spp permodalan Pendidikan, Pembangunan Gedung Sekolah, Rehab Gedung Sekolah, Paket Beasiswa) Kesehatan (Pembangunan Gedung Kesehatan, Rehab Gedung Kesehatan, Paket fasilitas kesehatan, Paket PMT)

3. Implementasi kegiatan PNPM

Kecamatan Tajinan telah berpartisipasi dalam PNPM Mandiri Perdesaan sejak tahun 2008 . Hingga saat ini, Kecamatan Tajinan telah mendapatkan dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) dan Dana tersebut dikelola secara mandiri oleh masyarakat melalui UPK Kecamatan Tajinan. Dana tersebut untuk mendanai kegiatan kegiatan yang di selenggarakan di di duabelas desa yang ada di Kecamatan tajinan yang di sambut dengan baik oleh seluruh masyarakat hingga saat ini.

Program PNPM Mandiri merupakan program pembangunan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari peran serta masyarakat dan perangkat pemerintahan daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hal yang dicapai. Pelaksanaan program pembangunan partisipatif seperti PNPM Mandiri menuntut peranserta dari seluruh aspek dalam kehidupan masyarakat itu sendiri serta dari pemerintah daerah atau relawan demi kelancaran proses pembangunan.

Dalam pelaksanaan program PNPM Mandiri di Kecamatan Tajinan, PNPM Mandiri merangkul elemen dalam pemyarakan tidak sekadar sebagai objek tetapi juga untuk menjadi mitra kerja atau sebagai subjek pengembangan. Dengan kata lain pelibatan lembaga-lembaga dan tokoh masyarakat untuk menampung aspirasi masyarakat secara langsung agar dapat diketahui potensi dan permasalahan. Berikut adalah kriteria dan jenis jenis kegiatan yang di kelola:

Tahapan pelaksanaan Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan diawali dengan Perencanaan kegiatan meliputi tahap persiapan dan sosialisasi awal, serta perencanaan di desa, di Kecamatan, dan di kabupaten. Tahap persiapan dan sosialisasi awal dimulai dari MAD Sosialisasi sampai dengan pelatihan KPMD/K. Perencanaan kegiatan di desa, dimulai dengan tahap penggalan gagasan sampai dengan musdes perencanaan atau dikenal dengan istilah Menggagas Masa Depan Desa (MMDD). Perencanaan kegiatan di Kecamatan dimulai dengan MAD prioritas usulan sampai dengan MAD penetapan usulan. Perencanaan kegiatan di kabupaten adalah perencanaan koordinatif, dimulai dari keterlibatan utusan Kecamatan dalam forum SKPD sampai dengan musrenbang kabupaten. Adapun tahapan – tahapan musyawarah dalam proses perencanaan kegiatan ini seperti yang dijelaskan dalam dokumen petunjuk teknis yang didapatkan oleh peneliti saat observasi di kantor UPK di adalah sebagai berikut:

a. Musyawarah Antar Desa (MAD) Sosialisasi

MAD sosialisasi merupakan pertemuan antar desa untuk sosialisasi awal tentang tujuan, prinsip, kebijakan, prosedur maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan PNPM Mandiri Perdesaan serta untuk menentukan kesepakatan-kesepakatan antar desa dalam melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan. Dalam proses MAD hasil yang diharapkan yakni memahami cara pengambilan keputusan di tingkat desa atau antar desa, utamanya menyangkut pemilihan kegiatan, keputusan pendanaan, dan

mekanisme penyaluran dana BLM dan dana pendukung lainnya, cara pemetaan RTM dan kegunaannya,

Dalam pelaksanaan MAD Sosialisasi hal yang perlu untuk dipahami juga tentang konsep BKAD, cara penanganan masalah, pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi, serta pola penyampaian informasi, Dipahaminya perencanaan partisipatif di desa dengan menggunakan pola MMDD sebagai panduan penyusunan RPJMDes, serta rencanaprogram/proyek kabupaten atau pihak lain yang akan dilaksanakan di desa.

Agenda dalam MAD sosialisasi pun juga menentukan kesepakatan-kesepakatan antar desa seperti disepakatinya mekanisme musyawarah antar desa termasuk terpilihnya ketua rapat, pokok-pokok kesepakatan dalam penyelenggaraan musyawarah, dan penetapan anggota tim perumus, jadwal kegiatan musyawarah desa sosialisasi dari tiap desa dan rencana pelaksanaan musyawarah antar desa prioritas usulan, waktu penyusunan detail desain dan RAB usulan kegiatan

b. Musyawarah Desa (Musdes) Sosialisasi

Musdes sosialisasi merupakan pertemuan masyarakat desa sebagai ajang sosialisasi atau penyebarluasan informasi PNPM Mandiri Perdesaan di desa, seperti Tersosialisasinya informasi pokok PNPM Mandiri Perdesaan, keputusan yang dihasilkan dalam musyawarah antar desa sosialisasi, Adanya pernyataan kesanggupan atau kesedian desa

mematuhi dan melaksanakan ketentuan PNPM Mandiri Perdesaan, konsep dan kebijakan, perencanaan kegiatan dengan pola Menggagas Masa Depan Desa (MMDD) sebagai dasar penyusunan RPJMDes, pola pemantauan, pemeriksaan, dan evaluasi, dipahaminya kebijakan tentang pemetaan RTM, pembentukan BKAD, penanganan masalah, pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi, pola penyampaian informasi.

Dimana dalam musdes sosialisasi juga dilaksanakan proses pemilihan Pengurus TPK terdiri dari; Ketua, Sekretaris, dan Bendahara, ditetapkannya BPD sebagai lembaga pengawas pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di desa, dibentuk tim pemantau dari unsur masyarakat untuk melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, dan dipilih dan ditetapkannya KPMD atau kader desa dan kader teknik yang akan memfasilitasi masyarakat dalam menyelenggarakan proses PNPM Mandiri Perdesaan.

c. Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

KPMD yang telah terpilih dalam musyawarah desa sosialisasi, akan memandu serangkaian tahapan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan yang diawali dengan proses penggalan gagasan di tingkat dusun dan kelompok masyarakat. Sebelum melakukan tugasnya, KPMD akan mendapat pelatihan. Agar KPMD dapat paham akan latar belakang, tujuan, prinsip, kebijakan dan tahapan atau mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan, pahami

akan peran dan tugasnya. Bertambahnya keterampilan melakukan teknik k fasilitasi pertemuan masyarakat dalam tahapan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, termasuk perencanaan secara partisipatif, Bertambahnya keterampilan memberikan pendampingan dan pembimbingan kepada masyarakat agar mampu mengelola PNPM Mandiri Perdesaan secara mandiri, dan Bertambahnya kemampuan administrasi dan pelaporan yang diperlukan.

d. Musyawarah Penggalan Gagasan

Musyawarah penggalan gagasan adalah pertemuan kelompok-kelompok/dusun untuk menemukan gagasan-gagasan sesuai kebutuhan masyarakat terutama RTM. Gagasan-gagasan yang disampaikan oleh masyarakat tidak sekedar gagasan kegiatan yang diajukan dalam rangka mendapatkan dana PNPM Mandiri Perdesaan, tetapi berupa gagasan-gagasan dalam kaitan langsung penanggulangan kemiskinan. Musyawarah penggalan gagasan dilakukan dengan memanfaatkan pertemuan rutin kelompok yang sudah ada (formal maupun informal). Bahan yang diperlukan adalah peta sosial dusun, daftar rumah tangga miskin dan sangat miskin di dusun berikut kriterianya, serta lembar diagram Venn kelembagaan.

e. Musyawarah Desa Khusus Perempuan (MKP)

MKP dihadiri oleh kaum perempuan dan dilakukan dalam rangka membahas gagasan-gagasan dari kelompok-kelompok perempuan dan

menetapkan usulan kegiatan yang merupakan kebutuhan desa. Usulan disampaikan perlu mempertimbangkan hasil penggalan gagasan yang telah dilakukan sebelumnya. Usulan hasil musyawarah tersebut selanjutnya dilaporkan ke musyawarah desa perencanaan untuk disahkan sebagai bagian dari usulan desa, dimana gagasan yang berasal dari MKP inilah yang menjadi prioritas usulan dalam Musdes Perencanaan nantinya.

f. Musdes Perencanaan

Musdes perencanaan merupakan pertemuan masyarakat di desa yang bertujuan untuk membahas seluruh gagasan kegiatan, hasil dari proses penggalan gagasan di kelompok-kelompok/dusun. Bahan-bahan yang harus disiapkan adalah peta desa hasil penggabungan semua peta dusun, rekap data RTM dusun, diagram Venn kelembagaan, rekap gagasan semua dusun, rekap masalah semua dusun, dan usulan kelompok perempuan.

Hasil yang diharapkan dari Musdes Perencanaan adalah Terumuskannya visi desa yang dibuat berdasarkan proses sebelumnya yang berasal dari penggalan gagasan dan MKP, Berdasarkan tabel penggalan gagasan, memiliki dan menetapkan satu usulan kegiatan sarana prasarana dasar atau kegiatan peningkatan kualitas hidup masyarakat (kesehatan atau pendidikan) dan peningkatan kapasitas kelompok-kelompok usaha ekonomi Terpilih dan ditetapkannya Tim Penulis Usulan, Tim Pemelihara. Terpilihnya sekurang-kurangnya satu

orang yang akan diusulkan menjadi calon pengurus UPK dan calon amat pada musyawarah antar desa prioritas usulan, Terpilihnya wakil-wakil desa yang akan hadir dalam musyawarah antar desa prioritas usulan.

g. Penulisan usulan Desa

Penulisan usulan merupakan kegiatan untuk menguraikan secara tertulis gagasan-gagasan kegiatan masyarakat yang sudah disetujui sebagai usulan desa yang akan diajukan pada MAD. Proses ini dilakukan oleh TPU yang telah dipilih dalam musyawarah desa perencanaan.

Sebelum melakukan penulisan, TPU akan mendapatkan pelatihan atau penjelasan terlebih dahulu dari F-Kec/ FT-Kec. Hasil yang diharapkan dari tim penulis usulan adalah tiga proposal kegiatan berdasarkan tusan Musdes Perencanaan yang akan diajukan ke MAD Prioritas Usulan, serta dokumen-dokumen yang diperlukan untuk musrenbang reguler, termasuk RPJMDes dan RKPDes.

Pengajuan usulan oleh desa harus disertai dengan desain sederhana, yaitu berupa gambar dari usulan kegiatan secara umum dengan perkiraan besaran pembiayaannya. Desa juga dapat mengajukan usulan dengan dilengkapi desain detail dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

h. Verifikasi Usulan

Verifikasi usulan merupakan tahap kegiatan yang bertujuan untuk memeriksa dan menilai kelayakan usulan kegiatan dari setiap desa untuk

didanai PNPM Mandiri Perdesaan. Verifikasi usulan kegiatan dilakukan oleh Tim Verifikasi yang dibentuk di Kecamatan dengan beranggotakan sekurang-kurangnya lima orang yang memiliki keahlian sesuai usulan kegiatan.

Sebelum menjalankan tugasnya TV akan mendapatkan pelatihan atau penjelasan terlebih dulu dari FK/FT atau Fasilitator Kabupaten. TV harus memberi umpan balik di desa sebelum menyusun rekomendasi kelayakan usulan. Rekomendasi penilaian kelayakan usulan diperiksa oleh FK/FT, terutama yang berkaitan dengan aspek teknis usulan kegiatan. Selanjutnya, TV membuat rekomendasi hasil penilaian disertai dengan catatan hasil pemeriksaan oleh FK/FT. Rekomendasi TV akan menjadi dasar pembahasan dalam MAD Prioritas Usulan. Proses verifikasi dapat dilihat lebih lanjut dalam penjelasan VI PTO.

i. MAD Prioritas Usulan

MAD prioritas usulan adalah pertemuan di Kecamatan yang bertujuan membahas dan menyusun peringkat usulan kegiatan. Penyusunan peringkat didasarkan atas kriteria kelayakan sebagaimana yang digunakan oleh TV dalam menilai usulan kegiatan. Penyusunan prioritas usulan-usulan SPP dilakukan secara terpisah sebelum penyusunan prioritas usulan-usulan desa lainnya. Pada pelaksanaan MAD Prioritas Usulan juga berlangsung proses pemilihan pengurus UPK

(Ketua, Sekretaris, Bendahara), beserta dengan Disampaikan laporan pertanggungjawaban tahunan UPK (bila UPK sudah terbentuk).

Disepakatinya sanksi-sanksi yang akan diterapkan selama pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan tersebut, juga dibahas dalam MAD Prioritas Usulan beserta Disampaikannya keputusan desa-desa yang bersepakat untuk membentuk BKAD sekaligus deklarasi pembentukan BKAD, disampaikannya usulan-usulan desa yang akan diajukan dan didanai dari sumber lain (APBD, ADD, dan pihak ketiga lain) dan dirumuskannya dokumen prioritas kegiatan pembangunan Kecamatan (renstra Kecamatan) dari hasil dokumen RPJMdes yang telah dirumuskan pada Musdes Perencanaan.

j. Musyawarah Antar Desa (MAD) Penetapan Usulan

MAD penetapan usulan merupakan musyawarah untuk mengambil keputusan terhadap usulan yang akan didanai dan berapah jumlah dana yang akan dibiayai melalui PNPM Mandiri Perdesaan. Keputusan pendanaan harus mengacu pada peringkat usulan yang telah dibuat pada saat MAD prioritas usulan. Jika pada saat MAD prioritas usulan, seluruh usulan telah selesai dibuat berikut detail desain dan RABnya, maka keputusan penetapan usulan yang akan dibiayai melalui PNPM Mandiri Perdesaan bisa langsung diselenggarakan setelah agenda MAD prioritas usulan

diselesaikan. Namun jika belum selesai desain dan RABnya, maka MAD penetapan usulan dilakukan pada waktu yang berbeda.

Pada pelaksanaan MAD Penetapan Usulan juga disepakati tentang pemberlakuan sanksi lokal, jadwal pelaksanaan kegiatan setiap desa, rancangan AD-ART BKAD menjadi ketetapan AD/ART BKAD. Penyusunan AD-ART BKAD ini sendiri dilakukan setelah MAD prioritas usulan. Serta prioritas kegiatan pembangunan Kecamatan yang dapat diajukan sebagai renstra Kecamatan, sekaligus utusan Kecamatan yang nantinya mewakili masyarakat dalam Forum SKPD. Dan disampaikannya informasi tentang status kontribusi pendanaan kabupaten

Dokumen yang dihasilkan: Berita acara hasil musyawara, Daftar usulan yang didanai, RKTL pelaksanaan, Renstra Kecamatan, AD-ART BKAD.

Adapun para Peserta MAD baik itu dari pelaksanaan MAD Sosialisasi, MAD Prioritas Usulan sampai MAD Penetapan Usulan terdiri dari Enam orang wakil per desa: Kepala desa, dua orang wakil dari BPD/nama lain yang sejenis (jika sudah ada), dan tiga orang tokoh masyarakat (minimal tiga dari keenam wakil tersebut adalah perempuan) dari semua desa di Kecamatan.

Secara umum unsur-unsur yang hadir dalam MAD adalah: Camat dan staf terkait, Wakil dari seluruh instansi sektoral kecamatan (ISK), Kades di lingkungan Kecamatan, BPD atau sebutan lainnya, Lembaga Pemberdayaan

Masyarakat (LPM), Wakil RTM dari setiap desa, Wakil perempuan dari setiap desa, Komite sekolah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/Organisasi, Massa (ormas), Tokoh masyarakat, tokoh agama, Anggota masyarakat lainnya yang berminat untuk hadir.

Hasil dari keputusan MAD penetapan usulan disahkan sesegera mungkin oleh Camat atas nama Bupati menjadi Surat Penetapan Camat (SPC) yang berisi tentang daftar alokasi bantuan PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan yang bersangkutan. SPC berikut lampirannya, mencantumkan nama desa, jenis kegiatan termasuk jumlah alokasi dananya, dikirimkan oleh PjOK kepada TK PNPM Mandiri Kabupaten dengan tembusan kepada Bupati, FK/T dan Fasilitator Kabupaten.

k. Musdes Informasi Hasil MAD

Musdes ini merupakan musyawarah sosialisasi atau penyebarluasan hasil penetapan alokasi dana PNPM Mandiri Perdesaan yang diputuskan dalam MAD penetapan usulan. Musdes ini dilaksanakan baik di desa yang mendapatkan dana maupun yang tidak. Khusus bagi desa-desa yang mendapatkan dana PNPM Mandiri Perdesaan, Dalam musdes dilaksanakan pemilihan dan penetapan nan lengkap TPK, yaitu ketua-ketua bidang sesuai dengan jenis

kegiatan yang didanai, Terbentuknya Tim Pemantau yang akan memantau pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan, disosialisasikannya jadwal pelaksanaan tiap kegiatan yang akan dilaksanakan,

disosialisasikannya sanksi-sanksi yang akan diberlakukan selama pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di desa tersebut, disepakatinya rencana realisasi sumbangan termasuk kompensasi lahan atau aset lain masyarakat, disepakatinya besarnya insentif bagi pekerja (per HOK) dan tata cara pembayarannya.

Dalam musdes ini juga mendapatkan sosialisasi tentang pembentukan BKAD beserta AD/ART yang telah ditetapkan pada MAD penetapan usulan, mekanisme pengadaan bahan dan alat, Disampaikannya kemajuan penanganan masalah dan rencana tindak lanjutnya.

Kegiatan dari PNPM yang di kelola oleh unit pelaksana kegiatan di Kecamatan Tajinan sebagai upaya peningkatan status sosial ekonomi masyarakat di antaranya meliputi bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan pembangunan sarana infrastruktur masyarakat. Prasarana(Pengerasan Jalan, Air Bersih, MCK, Infrastruktur Lain-lain) Modal SPP, Paket Spp permodalan) Pendidikan,Pembangunan Gedung Sekolah,Rehab Gedung Sekolah,Paket Beasiswa)Kesehatan (Pembangunan Gedung Kesehatan, Rehab Gedung Kesehatan, Paket fasilitas kesehatan, Paket PMT)

4. Dampak Program Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri

Dampak yang terjadi dengan adanya program PNPM Mandiri di Kelurahan Sekaran meliputi: dampak fisik, dampak sosial

dan dampak ekonomi. Hal ini dapat terlihat dari program-program yang di selenggarakan PNPM Mandiri di kelurahan sekaran antara lain :

a. Dampak fisik

Dampak dari program pengerasan jalan adalah perbaikan akses bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat untuk memudahkan masyarakat yang mayoritas petani lebih mudak aksek menuju ke perkebunan. Dan akses jalan antar desa yang memudahkan masyarakat dan dapat di nikmati langsung oleh masyarakat

Kegiatan lain yang dilaksanakan PNPM Mndiri di Kecamatan Tajinan adalah pembuatan talud (drainase) pada jalan jalan antar desa jala yang telah di perbaiki . Dampak dari program pembuatan talud (drainase) adalah agar permukaan jalan tidak tergenang air akibat hujan. Sehingga jalan yang dibangun bisa nyaman di lalu dalam kondisi apapun.

b. Dampak Sosial

kegiatan peningkatan kapasitas pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu, kegiatan ini berupa pemberian paket fasilitas kesehatan pemberian PMT pada saat posyandu dan juga pemberian paket beasiswa kegiatan lain yang juga di lakukan yaitu, pembangunan gedung sekolah, rehab gedung kesehatan dan rehab gedung sekolah , dampak dari program ini adalah memfasilitasi

masyarakat miskin mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan dengan mudah dan dapat di rasakan langsung oleh masyarakat.

c. Dampak ekonomi

Kegiatan Ekonomi yang dilakukan dalam program PNPM Mandiri berbentuk paket permodalan, yakni pemberian pinjaman modal usaha ke masyarakat dengan system pembayaran berangsur dan tanggung renteng. Sasarannya adalah kelompok masyarakat yang memiliki usaha- usaha produktif. Dampak dari program ekonomi bergulir adalah, warga yang semula kekurangan modal mendapat bantuan modal untuk mengembangkan usahanya.

Kegiatan lain yang dilaksanakan PNPM Mandiri di Kecamatan Tajinan adalah program pemberian bantuan permodalan usaha kepada warga yang kurang mampu. Khususnya pada kelompok perempuan yaitu berupa bantuan permodalan simpan pinjam khusus perempuan (SPP). Dampak dari program permodalan SPP adalah warga yang kurang mampu dapat mempunyai pekerjaan dan bisa di jadikan sebagai tambahan modal usaha.

Dana SPP di Kecamatan ini umumnya dimanfaatkan warga untuk penambahan modal usaha, mengembangkan jiwa wira usaha, menghindari pinjaman dari rentenir. Usaha anggota/ kelompok penerima manfaat SPP paling berkembang dan membanggakan di Kecamatan ini adalah:

Usaha Keripik Nangka milik Bu Tumiasih kelompok Anyelir di desa Gunungronggo. Keunggulan dari usaha/ kegiatan ini adalah Memanfaatkan potensi hasil alam yang ada di desa serta mengurangi jumlah pengangguran desa Gunungronggo, Sudah diakui dan diberi ijin dari Dinas Kesehatan..

Usaha Pembuatan Rengginang milik Bu Listari kelompok Dahlia di desa Tangkilsari. Keunggulan dari usaha/ kegiatan ini adalah Produk Rengginang ini telah beredar luas di pasaran. Karena Sudah Terkenal dengan Rasanya, maka permintaan Pasar akan produk ini sangat banyak. Sehingga Hampir pembuatan produk ini sudah dilaksanakan oleh ibu – ibu hampir satu desa Tangkilsari

Usaha Kue Muaco milik Bu Yuli kelompok Anyelir di desa Tajinan. Keunggulan dari usaha/ kegiatan ini adalah Bahwa Produk seperti ini di pasarkan di kota Malang dan Keluar Kota.. Kegiatan dari PNPM yang di kelola oleh unit pelaksana kegiatan di Kecamatan Tajinan sebagai upaya peningkatan status sosial ekonomi masyarakat di antaranya meliputi bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan pembangunan sarana infrastruktur masyarakat. Prasarana(Pengerasan Jalan, Air Bersih, MCK, Infrastruktur Lain-lain) Modal SPP, Paket Spp permodalan) Pendidikan,Pembangunan Gedung Sekolah,Rehab Gedung Sekolah,Paket Beasiswa)Kesehatan (Pembangunan Gedung Kesehatan, Rehab Gedung Kesehatan, Paket fasilitas kesehatan, Paket PMT)

Dari beberapa usaha kelompok permodalan SPP di Kecamatan Tajinan berhasil mengembangkan usaha rumahan masyarakat dan meningkatkan perekonomian yang di stimulus oleh bantuan pormodalan dari program pemberdayaan masyarakat PNPM mandiri pedesaan



BAB V

PEMBAHASAN

A. Analisis dan Interpretasi Data

Setelah peneliti mengumpulkan data hasil penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara / interview, observasi, serta dokumentasi maka selanjutnya peneliti akan melakukan analisis data untuk menjelaskan lebih lanjut dari penelitian.

Sesuai dengan analisa data yang dipilih oleh peneliti yaitu menggunakan analisa deskriptif kualitatif (pemaparan) dengan menganalisa data yang telah peneliti kumpulkan dari hasil wawancara/ interview, dan dokumentasi selama peneliti mengadakan penelitian dengan lembaga terkait.

Data yang sudah diperoleh dan dipaparkan oleh peneliti maka akan dianalisis oleh peneliti sesuai dengan hasil penelitian yang mengacu pada rumusan masalah. Dibawah ini adalah hasil dari analisis peneliti, yaitu

1. Bentuk kegiatan

Program PNPM Mandiri merupakan program pembangunan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintahan daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hal yang dicapai.

Pelaksanaan program pembangunan partisipatif seperti PNPM Mandiri menuntut peranserta dari seluruh aspek dalam kehidupan masyarakat itu

sendiri serta dari pemerintah daerah atau relawan demi kelancaran proses pembangunan.

Tahapan pembagnunan yang ada dalam masyarakat untuk selanjutnya masyarakat bisa lebih mengorganisasi dirinya dan membangun lembaga pimpinan kloektif sebagai representasi dari warga masyarakat karena bantuan yang di berikan oleh program pemberdayaan in bersifat stimulan, untuk menstimulasi kebedayaan dan kemandirian masyarakat.

Pemberdayaan menunjukkan pada kemampuan kelompok orang, khususnya kelompok lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan. menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan Pemberdayaanmenunjukkan pada kemampuan kelompok orang, khususnya kelompok lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam : a. memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; b. menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan.⁷⁴

⁷⁴Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: Refika aditama, 2010)
Hlm. 58.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa bahwa pemberdayaan melalui Program nasional pemberdayaan mandiri pedesaan ini dapat dimaknai sebagai suatu upaya untuk membentuk manusia lebih berhasil guna peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan adanya pemberian energi atau proses tindakan agar yang bersangkutan mampu bertindak mandiri dan didukung adanya peningkatan usaha yang mengarah ke peningkatan kesejahteraan, kemampuan, pengetahuan, penghasilan, yang merujuk pada peningkatan status sosial ekonomi masyarakat.

2. Proses Implementasi

Untuk meningkatkan status sosial ekonomi masyarakat Dalam pelaksanaannya program PNPM Mandiri di Kecamatan Tajinan, PNPM Mandiri merangkul elemen dalam masyarakat tidak sekadar sebagai objek tetapi juga untuk menjadi mitra kerja atau sebagai subjek pengembangan. Dengan kata lain pelibatan lembaga-lembaga dan tokoh masyarakat untuk menampung aspirasi masyarakat secara langsung agar dapat diketahui potensi dan permasalahan

Pelaksanaan program pembangunan partisipatif seperti PNPM Mandiri menuntut peranserta dari seluruh aspek dalam kehidupan masyarakat itu sendiri serta dari pemerintah daerah atau relawan demi kelancaran proses pembangunan.

Proses pemberdayaan pada umumnya dilandasi pada upaya mengoptimalkan proses kegiatan. proses adalah seluruh kegiatan/langkah-langkah secara bertahap yang dilakukandalam rangka pemberdayaan agen pembaharu, yang terdiri dari: ⁷⁵

- 1) pendekatan *capacity building* untuk memberdayakan kelembagaan agen pembaharu,
- 2) pendekatan *new public management* (NPM) untuk meningkatkan kemampuan manajerial agen pembaharu secara internal,
- 3) pendekatan kinerja untuk peningkatan kinerja organisasi agen pembaharu,
- 4) pendekatan substansial melalui pengorganisasian *knowledge, attitude, practice* (KAP) agar agen pembaharu menguasai aspek dan subtansi kemiskinan, mampu menentukan solusi dan pendekatan yang tepat untuk menciptakan kemandirian masyarakat.

Tahapan pelaksanaan Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaandi awali dengan Perencanaan kegiatan meliputi tahap persiapan dan sosialisasi awal, serta perencanaan di desa, di Kecamatan, dan di kabupaten. Tahap persiapan dan sosialisasi awal dimulai dari MAD Sosialisasi sampai dengan pelatihan KPMD/K. Perencanaan kegiatan di desa, dimulai dengan tahap penggalian gagasan

⁷⁵Ambar Teguh, Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*,(Yogyakarta: Media Pressindo, 2004), hlm. 118.

sampai dengan musdes perencanaan atau dikenal dengan istilah Menggagas Masa Depan Desa (MMDD). Perencanaan kegiatan di Kecamatan dimulai dengan MAD prioritas usulan sampai dengan MAD penetapan usulan. Perencanaan kegiatan di kabupaten adalah perencanaan koordinatif, dimulai dari keterlibatan utusan Kecamatan dalam forum SKPD sampai dengan musrenbang kabupaten. Adapun tahapan – tahapan musyawarah dalam proses perencanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut.⁷⁶

a. Musyawarah Antar Desa (MAD) Sosialisasi

MAD sosialisasi merupakan pertemuan antar desa untuk sosialisasi awal tentang tujuan, prinsip, kebijakan, prosedur maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan PNPM Mandiri Perdesaan serta untuk menentukan kesepakatan-kesepakatan antar desa dalam melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan. Dalam proses MAD hasil yang diharapkan yakni memahami cara pengambilan keputusan di tingkat desa atau antar desa, utamanya menyangkut pemilihan kegiatan, keputusan pendanaan, dan mekanisme penyaluran dana BLM dan dana pendukung lainnya, cara pemetaan RTM dan kegunaannya,

Dalam pelaksanaan MAD Sosialisasi hal yang perlu untuk dipahami juga tentang konsep BKAD, cara penanganan masalah, pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi, serta pola penyampaian informasi, Dipahaminya perencanaan partisipatif di desa dengan menggunakan pola

⁷⁶ FINAL Petunjuk Teknis Operasional PTO Bab 1_4 25 Oktober 2013

MMDD sebagai panduan penyusunan RPJMDes, serta rencanaprogram/proyek kabupaten atau pihak lain yang akan dilaksanakan di desa.

Agenda dalam MAD sosialisasi pun juga menentukan kesepakatan-kesepakatan antar desa seperti disepakatinya mekanisme musyawarah antar desa termasuk terpilihnya ketua rapat, pokok-pokok kesepakatan dalam penyelenggaraan musyawarah, dan penetapan anggota tim perumus, jadwal kegiatan musyawarah desa sosialisasi dari tiap desa dan rencana pelaksanaan musyawarah antar desa prioritas usulan, waktu penyusunan detail desain dan RAB usulan kegiatan

b. Musyawarah Desa (Musdes) Sosialisasi

Musdes sosialisasi merupakan pertemuan masyarakat desa sebagai ajang sosialisasi atau penyebarluasan informasi PNPM Mandiri Perdesaan di desa, seperti Tersosialisasinya informasi pokok PNPM Mandiri Perdesaan, keputusan yang dihasilkan dalam musyawarah antar desa sosialisasi, Adanya pernyataan kesanggupan atau kesedian desa mematuhi dan melaksanakan ketentuan PNPM Mandiri Perdesaan, konsep dan kebijakan, perencanaan kegiatan dengan pola Menggagas Masa Depan Desa (MMDD) sebagai dasar penyusunan RPJMDes, pola pemantauan, pemeriksaan, dan evaluasi, dipahaminya kebijakan tentang pemetaan RTM, pembentukan BKAD, penanganan masalah, pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi, pola penyampaian informasi.

Dimana dalam musdes sosialisasi juga dilaksanakan proses pemilihan Pengurus TPK terdiri dari; Ketua, Sekretaris, dan Bendahara, ditetapkannya BPD sebagai lembaga pengawas pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di desa, dibentuk tim pemantau dari unsur masyarakat untuk melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, dan dipilih dan ditetapkannya KPMD atau kader desa dan kader teknik yang akan memfasilitasi masyarakat dalam menyelenggarakan proses PNPM Mandiri Perdesaan.

c. Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

KPMD yang telah terpilih dalam musyawarah desa sosialisasi, akan memandu serangkaian tahapan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan yang diawali dengan proses penggalan gagasan di tingkat dusun dan kelompok masyarakat. Sebelum melakukan tugasnya, KPMD akan mendapat pelatihan. Agar KPMD dapat paham akan latar belakang, tujuan, prinsip, kebijakan dan tahapan atau mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan, pahami akan peran dan tugasnya. Bertambahnya keterampilan melakukan teknik kofasilitasi pertemuan masyarakat dalam tahapan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, termasuk perencanaan secara partisipatif, Bertambahnya keterampilan memberikan pendampingan dan pembimbingan kepada masyarakat agar mampu mengelola PNPM Mandiri Perdesaan secara mandiri, dan Bertambahnya kemampuan administrasi dan pelaporan yang diperlukan.

d. Musyawarah Penggalan Gagasan

Musyawarah penggalan gagasan adalah pertemuan kelompok-kelompok/dusun untuk menemukan gagasan-gagasan sesuai kebutuhan masyarakat terutama RTM. Gagasan-gagasan yang disampaikan oleh masyarakat tidak sekedar gagasan kegiatan yang diajukan dalam rangka mendapatkan dana PNPM Mandiri Perdesaan, tetapi berupa gagasan-gagasan dalam kaitan langsung penanggulangan kemiskinan. Musyawarah penggalan gagasan dilakukan dengan memanfaatkan pertemuan rutin kelompok yang sudah ada (formal maupun informal). Bahan yang diperlukan adalah peta sosial dusun, daftar rumah tangga miskin dan sangat miskin di dusun berikut kriterianya, serta lembar diagram Venn kelembagaan.

e. Musyawarah Desa Khusus Perempuan (MKP)

MKP dihadiri oleh kaum perempuan dan dilakukan dalam rangka membahas gagasan-gagasan dari kelompok-kelompok perempuan dan menetapkan usulan kegiatan yang merupakan kebutuhan desa. Usulan disampaikan perlu mempertimbangkan hasil penggalan gagasan yang telah dilakukan sebelumnya. Usulan hasil musyawarah tersebut selanjutnya dilaporkan ke musyawarah desa perencanaan untuk disahkan sebagai bagian dari usulan desa, dimana gagasan yang berasal dari MKP inilah yang menjadi prioritas usulan dalam Musdes Perencanaan nantinya.

f. Musdes Perencanaan

Musdes perencanaan merupakan pertemuan masyarakat di desa yang bertujuan untuk membahas seluruh gagasan kegiatan, hasil dari proses penggalian gagasan di kelompok-kelompok/dusun. Bahan-bahan yang harus disiapkan adalah peta desa hasil penggabungan semua peta dusun, rekap data RTM dusun, diagram Venn kelembagaan, rekap gagasan semua dusun, rekap masalah semua dusun, dan usulan kelompok perempuan.

Hasil yang diharapkan dari Musdes Perencanaan adalah Terumuskannya visi desa yang dibuat berdasarkan proses sebelumnya yang berasal dari penggalian gagasan dan MKP, Berdasarkan tabel penggalian gagasan, memiliki dan menetapkan satu usulan kegiatan sarana prasarana dasar atau kegiatan peningkatan kualitas hidup masyarakat (kesehatan atau pendidikan) dan peningkatan kapasitas kelompok-kelompok usaha ekonomi Terpilih dan ditetapkannya Tim Penulis Usulan, Tim Pemelihara. Terpilihnya sekurang-kurangnya satu orang yang akan diusulkan menjadi calon pengurus UPK dan calon amat pada musyawarah antar desa prioritas usulan, Terpilihnya wakil-wakil desa yang akan hadir dalam musyawarah antar desa prioritas usulan.

g. Penulisan usulan Desa

Penulisan usulan merupakan kegiatan untuk menguraikan secara tertulis gagasan-gagasan kegiatan masyarakat yang sudah disetujui

sebagai usulan desa yang akan diajukan pada MAD. Proses ini dilakukan oleh TPU yang telah dipilih dalam musyawarah desa perencanaan.

Sebelum melakukan penulisan, TPU akan mendapatkan pelatihan atau penjelasan terlebih dahulu dari F-Kec/ FT-Kec. Hasil yang diharapkan dari tim penulis usulan adalah tiga proposal kegiatan berdasarkan tusan Musdes Perencanaan yang akan diajukan ke MAD Prioritas Usulan, serta dokumen-dokumen yang diperlukan untuk musrenbang reguler, termasuk RPJMDes dan RKPDes.

Pengajuan usulan oleh desa harus disertai dengan desain sederhana, yaitu berupa gambar dari usulan kegiatan secara umum dengan perkiraan besaran pembiayaannya. Desa juga dapat mengajukan usulan dengan dilengkapi desain detail dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

h. Verifikasi Usulan

Verifikasi usulan merupakan tahap kegiatan yang bertujuan untuk memeriksa dan menilai kelayakan usulan kegiatan dari setiap desa untuk didanai PNPM Mandiri Perdesaan. Verifikasi usulan kegiatan dilakukan oleh Tim Verifikasi yang dibentuk di Kecamatan dengan beranggotakan sekurang-kurangnya lima orang yang memiliki keahlian sesuai usulan kegiatan.

Sebelum menjalankan tugasnya TV akan mendapatkan pelatihan atau penjelasan terlebih dulu dari FK/FT atau Fasilitator Kabupaten. TV

harus memberi umpan balik di desa sebelum menyusun rekomendasi kelayakan usulan. Rekomendasi penilaian kelayakan usulan diperiksa oleh FK/FT, terutama yang berkaitan dengan aspek teknis usulan kegiatan. Selanjutnya, TV membuat rekomendasi hasil penilaian disertai dengan catatan hasil pemeriksaan oleh FK/FT. Rekomendasi TV akan menjadi dasar pembahasan dalam MAD Prioritas Usulan.

i. MAD Prioritas Usulan

MAD prioritas usulan adalah pertemuan di Kecamatan yang bertujuan membahas dan menyusun peringkat usulan kegiatan. Penyusunan peringkat didasarkan atas kriteria kelayakan sebagaimana yang digunakan oleh TV dalam menilai usulan kegiatan. Penyusunan prioritas usulan-usulan SPP dilakukan secara terpisah sebelum penyusunan prioritas usulan-usulan desa lainnya. Pada pelaksanaan MAD Prioritas Usulan juga berlangsung proses pemilihan pengurus UPK (Ketua, Sekretaris, Bendahara), beserta dengan Disampaikan laporan pertanggungjawaban tahunan UPK (bila UPK sudah terbentuk).

Disepakatinya sanksi-sanksi yang akan diterapkan selama pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan tersebut, juga dibahas dalam MAD Prioritas Usulan beserta Disampaikannya keputusan desa-desa yang bersepakat untuk membentuk BKAD sekaligus deklarasi pembentukan BKAD, disampaikannya usulan-usulan desa yang akan diajukan dan didanai dari sumber lain (APBD, ADD, dan pihak ketiga lain)

dan dirumuskannya dokumen prioritas kegiatan pembangunan Kecamatan (renstra Kecamatan) dari hasil dokumen RPJMdes yang telah dirumuskan pada Musdes Perencanaan.

j. Musyawarah Antar Desa (MAD) Penetapan Usulan

MAD penetapan usulan merupakan musyawarah untuk mengambil keputusan terhadap usulan yang akan didanai dan berapah jumlah dana yang akan dibiayai melalui PNPM Mandiri Perdesaan. Keputusan pendanaan harus mengacu pada peringkat usulan yang telah dibuat pada saat MAD prioritas usulan. Jika pada saat MAD prioritas usulan, seluruh usulan telah selesai dibuat berikut detail desain dan RABnya, maka keputusan penetapan usulan yang akan dibiayai melalui PNPM Mandiri Perdesaan bisa langsung diselenggarakan setelah agenda MAD prioritas usulan diselesaikan. Namun jika belum selesai desain dan RABnya, maka MAD penetapan usulan dilakukan pada waktu yang berbeda.

Pada pelaksanaan MAD Penetapan Usulan juga disepakati tentang pemberlakuan sanksi lokal, jadwal pelaksanaan kegiatan setiap desa, rancangan AD-ART BKAD menjadi ketetapan AD/ART BKAD. Penyusunan AD-ART BKAD ini sendiri dilakukan setelah MAD prioritas usulan. Serta prioritas kegiatan pembangunan Kecamatan yang dapat diajukan sebagai renstra Kecamatan, sekaligus utusan Kecamatan yang nantinya mewakili masyarakat dalam Forum SKPD. Dan disampaikan informasi tentang status kontribusi pendanaan kabupaten

Dokumen yang dihasilkan: Berita acara hasil musyawara, Daftar usulan yang didanai, RKTL pelaksanaan, Renstra Kecamatan, AD-ART BKAD.

Adapun para Peserta MAD baik itu dari pelaksanaan MAD Sosialisasi, MAD Prioritas Usulan sampai MAD Penetapan Usulan terdiri dari Enam orang wakil per desa: Kepala desa, dua orang wakil dari BPD/nama lain yang sejenis (jika sudah ada), dan tigaorang tokoh masyarakat (minimal tiga dari keenam wakil tersebut adalah perempuan) dari semua desa di Kecamatan.

Hasil dari keputusan MAD penetapan usulan disahkan sesegera mungkin oleh Camat atas nama Bupati menjadi Surat Penetapan Camat (SPC) yang berisi tentang daftar alokasi bantuan PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan yang bersangkutan. SPC berikut lampirannya, mencantumkan nama desa, jenis kegiatan termasuk jumlah alokasi dananya, dikirimkan oleh PjOK kepada TK PNPM Mandiri Kabupaten dengan tembusan kepada Bupati, FK/T dan Fasilitator Kabupaten.

k. Musdes Informasi Hasil MAD

Musdes ini merupakan musyawarah sosialisasi atau penyebarluasan hasil penetapan alokasi dana PNPM Mandiri Perdesaan yang diputuskan dalam MAD penetapan usulan.

Dalam proses pelaksanaannya program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan ini di setiap tahapanya melibatkan seluruh lapisan masyarakat mulai dari perencanaan, pengambilan keputusan, penetapan prioritas dengan berbagai sosialisasi, musyawarah, dan negosiasi prioritas.

3. Hasil Implementasi

Dampak yang terjadi dengan adanya program PNPM Mandiri di Kelurahan Sekaran meliputi: dampak fisik, dampak sosial dan dampak ekonomi. Hal ini dapat terlihat dari program-program yang di selenggarakan PNPM Mandiri di kelurahan sekaran antara lain :

a. Dampak fisik

Kegiatan yang dilakukan di Kecamatan Tajinan diantaranya berupa pengerasan jalan antar dusun randugading srigading dan ngembulsari. Kemudian jalan antar desa tangkilsari dan desa sumbersuko dan di desa ngawonggo. Dampak dari program pengerasan jalan adalah perbaikan akses bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat untuk memudahkan masyarakat yang mayoritas petani lebih mudak aksek menuju ke perkebunan. Dan akses jalan antardesa yang memudahkan masyarakat dan dapat di nikmati langsung oleh masyarakat

Kegiatan lain yang dilaksanakan PNPM Mndiri di Kelurahan Sekaran adalah pembuatan talud (drainase) pada jalan jalan antar desa jala yang telah di perbaiki . Dampak dari program pembuatan talud (drainase) adalah agar

permukaan jalan tidak tergenang air akibat hujan. Sehingga jalan yang dibangun bisa nyaman di lalu dalam kondisi apapun.

b. Dampak Sosial

kegiatan peningkatan kapasitas pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu, kegiatan ini berupa pemberian paket fasilitas kesehatan pemberian PMT pada saat posyandu dan juga pemberian paket beasiswa kegiatan lain yang juga di lakukan yaitu, pembangunan gedung sekolah, rehab gedung kesehatan dan rehab gedung sekolah , dampak dari program ini adalah memfasilitasi masyarakat miskin mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan dengan mudah dan dapat di rasakan langsung oleh masyarakat.

Mudahnya akses pendidikan akan menciptakan generasi yang cepat tanggap terhadap gejala gejala sosial yang terjadi sehingga dapat memahami dan mengambil peluang peluang untuk mencapai kesejahteraan. Pendidikan merupakan suatu alat yang akan membina dan mendorong seseorang untuk berfikir secara rasional maupun logis, dapat meningkatkan kesadaran untuk menggunakan waktu sebaik-baiknya (seefektif dan seefisien mungkin) dengan menyerap banyak pengalaman mengenai keahlian dan keterampilan sehingga menjadi cepat tanggap terhadap gejala-gejala sosial yang terjadi”⁷⁷

⁷⁷ Soekanto, Soerjono, Sosiologi Suatu Pengantar,(Jakarta Raja Grafindo Persada, 1990) hlm. 143.

“Pendidikan adalah segala perbuatan yang etis, kreatif, sistematis dan intensional dibantu oleh metode dan teknik ilmiah diarahkan pada pencapaian tujuan pendidikan tertentu ”⁷⁸

Dengan pendidikan ini diharapkan dapat membuka pikiran seseorang untuk menerima hal-hal yang baru (sub culture baru) baik berupa teknologi, materi, sistem teknologi maupun berupa ide-ide baru serta bagaimana cara berfikir secara alamiah untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan dirinya, masyarakat dan tanah airnya.⁷⁹

c. Dampak ekonomi

Kegiatan Ekonomi yang dilakukan dalam program PNPM Mandiri berbentuk ekonomi bergulir, yakni pemberian pinjaman modal usaha ke masyarakat dengan system pembayaran berangsur dan tanggung renteng. Sasarannya adalah kelompok masyarakat yang memiliki usaha- usaha produktif. Dampak dari program ekonomi bergulir adalah , warga yang semula kekurangan modal mendapat bantuan modal untuk mengembangkan usahanya.

Kegiatan lain yang dilaksanakan PNPM Mndiri di Kecamatan Tajinan adalah program pemberian bantuan permodalan usaha kepada warga yang kurang mampu. Dampak dari program permodalan SPP adalah warga yang kurang mampu dapat mempunyai pekerjaan dan bisa di jadikan sebagai

⁷⁸ Purbakawatja, Soegarda, *Pendidikan dalam Alam Indonesia Merdeka*(Jakarta, Gunung Agung, , 1970)

⁷⁹ Sudjana, D. *Manajemen Program Pendidikan untuk Pendidikan Luar Sekolah*. Bandung: Falah Production 2000. Hlm. 37

tambahan modal usaha sehingga meningkatkan status sosial ekonomi masyarakat di Kecamatan Tajinan

Pekerjaan seseorang akan mempengaruhi kemampuan ekonominya, untuk itu bekerja merupakan suatu keharusan bagi setiap individu sebab dalam bekerja mengandung dua segi, kepuasan jasmani dan terpenuhinya kebutuhan hidup. Dalam kaitan ini Soeroto memberikan definisi mengenai pekerjaan sebagai berikut :⁸⁰

Pekerjaan adalah kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa bagi diri sendiri atau orang lain, baik orang melakukan dengan dibayar atau tidak. Dengan bekerja orang akan memperoleh pendapatan. Pendapatan ini memberikan kepadanya dan keluarganya untuk mengkonsumsi barang dan jasa hasil pembangunan dengan demikian menjadi lebih jelas, barang siapa yang mempunyai produktif, maka ia telah nyata berpartisipasi secara nyata dan aktif dalam pembangunan.

⁸⁰ Soekanto, Soerjono, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta Raja Grafindo Persada, 1990) hlm 167

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk kegiatan program pemberdayaan PNPM dalam meningkatkan status sosial ekonomi masyarakat di Kecamatan Tajinan terdapat berbagai Kegiatan dari PNPM yang di kelola oleh unit pelaksana kegiatan di Kecamatan Tajinan sebagai upaya peningkatan status sosial ekonomi masyarakat di antaranya meliputi bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan pembangunan sarana infrastruktur masyarakat. seperti Prasarana (Pengerasan Jalan, Air Bersih, MCK, Infrastruktur Lain-lain) Modal SPP, Paket Spp permodalan) Pendidikan, Pembangunan Gedung Sekolah, Rehab Gedung Sekolah, Paket Beasiswa) Kesehatan (Pembangunan Gedung Kesehatan, Rehab Gedung Kesehatan, Paket fasilitas kesehatan, yang keseluruhanya di pruntukan kesejahteraan masyarakat.
2. Proses implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat PNPM dalam meningkatkan status sosial ekonomi masyarakat di Kecamatan Tajinan dalam prosesnya mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan melibatkan seluruh lapisan masyarakat untukberpartisipasi dan bukan sebagai objek yang hanya secara pasifmenerima batuan Dengan kata lain dalam hal ini pelibatan lembaga-lembaga dan tokoh masyarakat untuk menampung aspirasi masyarakat secara langsung agar dapat diketahui potensi dan permasalahan Pelaksanaan program pembangunan partisipatif menuntut peran serta dari seluruh aspek dalam kehidupan masyarakat itu sendiri serta dari pemerintah daerah atau relawan demi kelancaran proses pembangunan.

3. Hasil implementasi program pemberdayaan PNPM mandiri pedesaan dalam meningkatkan status sosial ekonomi masyarakat di Kecamatan Tajinan dari berbagai Kegiatan dari PNPM yang di kelola oleh unit pelaksana kegiatan di Kecamatan Tajinan dapat meningkatkan status sosial ekonomi masyarakat di antaranya meliputi bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan penbangunan sarana masyarakat dengan adanya kegiatan kegiatan tersebut dapat menstimulus keberdayaan masyarakat untuk lebih berdaya dan sejahtera dan meningkatkan status sosial ekonomi masyarakat



Daftar Pustaka

- Ambar Teguh, Sulistiyani. 2004. *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta; PT. Rineka Cipta.
- Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Petunjuk Teknis Operasional PNPM Generasi Sehat Dan Cerdas 2013.
- Fajar, A. Malik. 1999. *Reorientasi Pendidikan Islam*. Jakarta : Fajar Dunia.
- Purbakawatja, Soegarda, *Pendidikan dalam Alam Indonesia Merdeka*(Jakarta, Gunung Agung, , 1970)
- Ghony, M. Djunaidi. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Hadi, Sutrisno. 1989. *Metodologi Research 1*. Yogyakarta: Andi Offseat.
- Hamidi. 2004. *Metode penelitian Kualitatif*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Pers.
- Ihsan, Fuad. 1995. *Dasar-dasar Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Jalal, Fasli & Supriyadi, Dedi. 2001. *Reformasi Pendidikan Nasional Dalam Konteks Otonomi Daerah Daerah*. Yogyakarta : Adicita Karya Nusa.
- Laode Zainudin, <http://organisasi.org/pengertian-pengangguran-dan-jenis-macam-pengangguranfriksional-struktural-musiman-siklikal>, diakses tgl 2-09-2016 08:55
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Terbitan Departemen Pendidikan Kebudayaan (Balai Pustaka).
- Mahfud, Choirul. 2008. *Pendidikan Multicultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Meleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*. Bandung; Remaja Rosdakarya.
- Munandar, Utami, 2002. *Kreativitas dan keberbakatan : Strategi Mewujudkan Potensi Kreatif dan Anak Berbakat*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Nazir, Moh. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008. 2010. *Tentang Wajib Belajar 9 Tahun*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. Departemen Pendidikan Nasional.

Ramayulis. 1994. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta Kalam Mulia.

Subagyo, Joko. 2004. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. J

Sugiono. 2008. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfa Beta.

Suharto, Edi. 2010. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.

Sukmadinata, Nana Syaidoh. 2007. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Rosdaya Karya.

Term Of Refrence TOR UPK Dan Pokja PNPM PNPM MANDIRI PEDESAAN 2015

FINAL Petunjuk Teknis Operasional PTO Bab 1_4 25 Oktober 2013

UU RI No.20 Tahun 2003. 2006. *Tentang Sisitem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika.

PEDOMAN WAWANCARA**PENINGKATAN STATUS SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT MELALUI
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN
TAJINAN KABUPATEN MALANG***(PENGURUS)***A. Identitas Subjek**

Nama :

Usia :

Jenis kelamin :

Alamat :

Pekerjaan :

B. Pertanyaan

1. Bentuk Program Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

Mandiri

1. Apa yang anda ketahui tentang PNPM mandiri?
2. Bagaimana sosialisasi tentang PNPM mandiri dimasyarakat?
3. Program apa saja yang ada dilaksanakan PNPM Mandiri di kecamatan tajinan ?

2. Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat PNPM

4. Bagaimana musyawarah yang terjadi didesa tentang PNPM mandiri?
5. Bagaimana proses pelaksanaan kegiatan di PNPM mandiri kecamatan tajinan
7. Berapa dana yang digulirkan oleh pemerintah dalam pelaksanaan program PNPM Mandiri di desa ini?
8. Bagaimana cara menyalurkan dana dan pencairan dana?
 - . Darimana anggaran kegiatan/proyek yang di dapat?
14. Darimana ide atau gagasan itu muncul?
15. Bagaimanakah pemanfaatan proyek setelah dikerjakan?
16. Bagaimanakah pemeliharaan proyek setelah dibangun?

3. Dampak Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan

17. Apa saja dampak pemberdayaan masyarakat PNPM mandiri perkotaan bagi masyarakat?
18. Apa saja masalah-masalah yang terjadi saat pelaksanaan program pemberdayaan itu berlangsung?
19. Bagaimana solusi memecahkan masalah saat pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri perkotaan?
20. Bagaimanakah peningkatan pendapatan masyarakat setelah adanya PNPM mandiri?

EDOMAN WAWANCARA

**PENINGKATAN STATUS SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT MELALUI
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN
TAJINAN KABUPATEN MALANG**

(MASYARAKAT)

A. Identitas Subjek

Nama :
Usia :
Jenis kelamin :
Alamat :
Pekerjaan :

B. Pertanyaan

1. Bentuk Program Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

Mandiri

1. Apa yang anda ketahui tentang PNPM mandiri?
2. Bagaimana sosialisasi tentang PNPM mandiri dimasyarakat?

2. Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat PNPM

3. Bagaimana menurut bapak/ibu pelaksanaan PNPM Mandiri pedesaan yang ada di desa ini?
4. Apa yang bapak rasakan dengan adanya PNPM Mandiri Pedesaan di desa ini?
5. Apakah bapak/ibu mengetahui apa saja jenis PNPM Mandiri pedesaan yang dilaksanakan di desa ini?
6. Bagaimana musyawarah yang terjadi didesa tentang PNPM mandiri?

3. Dampak Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan

13. Menurut bapak/ibu kegiatan apakah yang telah di laksanakan dari pnpm untuk masyarakat ?
14. Apa yang bapak/ibu rasakan setelah adanya program PNPM Mandiri di Kelurahan Sekaran ini?
pendapatan masyarakat bertambah setelah adanya program PNPM Mandiri



**PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN-GENERASI SEHAT & CERDAS
KECAMATAN TAJINAN KABUPATEN MALANG**

Jalan Raya Tajinan Nomor 32 Telp. (0341)4453130 Kode Pos: 65172



Tajinan, 03 September 2016

Nomor : 48/UPK-TJN/-GSC/XI/2016
Sifat : -
Lamp. : -
Perihal : Keterangan

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suharwanto
Jabatan : Ketua UPK
Alamat : Jalan Raya Tajinan Nomor 32 Malang

Menerangkan bahwa :

Nama : David Ardiyanto
Nim : 12130076
Jurusan : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Fakultas : Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK)

Telah melakukan penelitian dalam rangka pembuatan skripsi yang berjudul
**“Peningkatan Status Sosial Ekonomi Masyarakat Melalui Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang”**.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Ketua UPK,



SUHARWANTO



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
Jalan Gajayana 50, Telepon (0341) 552398 Faximile (0341) 552398 Malang
[http:// fitk.uin-malang.ac.id](http://fitk.uin-malang.ac.id). email : fitk_uinmalang@yahoo.com

Nomor : Un.3.1/TL.00.10712/2016 30 September 2016
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Izin Penelitian**

Kepada
Yth. Kepala Unit Pengelola Kegiatan PNPM Kecamatan Tajinan Malang
di
Malang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, dalam rangka menyelesaikan tugas akhir berupa penyusunan skripsi mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, kami mohon dengan hormat agar mahasiswa berikut:

Nama : David Ardiyanto
NIM : 12130076
Jurusan : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (PIPS)
Semester – Tahun Akademik : Ganjil - 2016/2017
Judul Skripsi : **Peningkatan Status Sosial Ekonomi Masyarakat melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Tajinan Malang**

diberi izin untuk melakukan penelitian di lembaga/instansi yang menjadi wewenang Bapak/Ibu.

Demikian, atas perkenan dan kerjasama Bapak/Ibu yang baik disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



an Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik,

Dr. H. Sulalan, M.Ag
NIP. 19651/12 199403 2 002

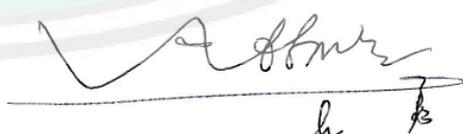
Tembusan :

1. Yth. Ketua Jurusan PIPS
2. Arsip

Nama Mahasiswa : David Ardiyanto
 NIM : 12130076
 Jurusan/ Fakultas : PIPS/ Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
 Dosen Pembimbing : Umi Julaihah, SE., M.Si
 Judul Skripsi : Peningkatan Status Sosial Ekonomi Masyarakat Melalui
 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Di
 Kecamatan Tajinan Malang

NO.	Tanggal	Hal yang dikonsultasikan	Paraf
1.	27 Juni 2016	BAB I	
2.	23 Juli 2016	ACC BAB I dan Revisi BAB II, III	
3.	10 Agustus 2016	ACC Proposal Skripsi	
4.	1 September 2016	Revisi BAB IV	
5.	5 September 2016	ACC BAB IV dan Revisi BAB V	
6.	13 September 2016	ACC BAB I, II, II, IV dan Revisi BAB V	
7.	16 September 2016	ACC BAB V dan Revisi BAB VI	
8.	21 September 2016	ACC BAB IV dan Revisi Abstrak	
9.	26 September 2016	ACC ABSTRAK	
10.	29 September 2016	ACC SKRIPSI	

Malang, 29 September 2016
 Mengetahui, Ketua Jurusan


Dr.H. Abdul Bashit, M.Si
 NIP. 197610022003121003